



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

KKP
2025

EKONOMI BIRU UNTUK
INDONESIA EMAS

LAPORAN KINERJA PUSAT PENDIDIKAN KP

TRIWULAN I

2025



BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat – Nya, sehingga Laporan Kinerja Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan Triwulan I Tahun 2025 ini dapat diselesaikan. Penyusunan laporan ini merupakan suatu bentuk akuntabilitas organisasi yang tertuang melalui Perjanjian Kinerja. Penyusunan Laporan Kinerja ini berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor

29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini mencakup realisasi dan capaian atas target yang ditetapkan pada periode Triwulan I Tahun 2025.

Capaian Nilai Kinerja Organisasi Pusat Pendidikan KP Triwulan I Tahun 2025 sebesar 107,50 dari dua puluh delapan (28) indikator kinerja. Dari tiga indikator kinerja yang ditetapkan targetnya pada triwulan I ini, ada dua indikator kinerja yang mencapai persentase capaian 100%, dan ada satu indikator kinerja yang mencapai persentase capaian 120%. Capaian kinerja ini merupakan awal yang baik untuk mendukung pencapaian kinerja di triwulan selanjutnya.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Laporan Kinerja Pusat Pendidikan Triwulan I Tahun 2025 ini. Semoga Laporan Kinerja ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik sebagai informasi maupun sebagai bahan evaluasi kinerja.

Jakarta, 17 April 2025

Ketua Pusat Pendidikan
Kelautan dan Perikanan,



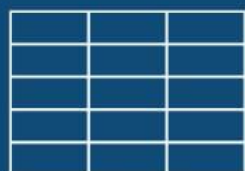
Dr. Puji Eddy Koropitan, S.Pi, M.Si
Laporan Kinerja Triwulan I



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
RINGKASAN EKSEKUTIF	vi
BAB I	PENDAHULUAN
A. Latar Belakang	2
B. Tujuan	3
C. Tugas dan Fungsi	3
D. Keragaan Sumber Daya Manusia Pusat Pendidikan KP	9
E. Sistematika Laporan Kinerja.....	10
F. Potensi dan Permasalahn.....	11
BAB II	PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA
A. Rencana Strategis	14
B. Rencana Kerja Tahun 2025.....	16
C. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025	16
D. Pengukuran Kinerja	18
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA
A. Prestasi Indikator Kinerja Kegiatan Triwulan I Tahun 2025	21
B. Evaluasi dan Analisis Kinerja Utama	24
C. Akuntabilitas Keuangan	49
D. Efisiensi Anggaran dan Alokasi Sumber Daya Pusat Pendidikan KP	51
BAB IV	PENUTUP
A. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	53
B. Permasalahan dan Rekomendasi	54
LAMPIRAN	
Link Bukti Dukung Capaian Pusat Pendidikan KP	
Perjanjian Kinerja Pusat Pendidikan KP Tahun 2025	

DAFTAR TABEL



Tabel 1.1	Uraian Fungsi Tim Kerja Pusat Pendidikan KP.....	5
Tabel 2.1	Rencana Kerja Pusat Pendidikan KP Tahun 2024	16
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Pusat Pendidikan KP Tahun 2025	17
Tabel 3.1	Target dan Capaian Kinerja Tahun Triwulan I Tahun 2025 Pusat Pendidikan KP	25
Tabel 3.2	Jumlah peserta didik pada Satuan Pendidikan lingkup KKP pada TA 2024/2025	29
Tabel 3.3	Dokumen Kerjasama yang sudah Disepakati	31
Tabel 3.4	Capaian IK 22 : Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pusat Pendidikan KP (%)	42
Tabel 3.5	IK Tabel Perbandingan Capaian Kinerja pada Level Unit Kerja Lingkup BPPSDM KP	43
Tabel 3.6	Capaian IK 25 : Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Pusat Pendidikan KP (%)	46
Tabel 3.7	Tabel Perbandingan Capaian Kinerja pada Level Unit Kerja Lingkup BPPSDM KP	46
Tabel 3.8	Capaian IK 28 : Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lingkup Pusdik KP (%)	48
Tabel 3.9	Target dan Capaian Dokumen pada IK : Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lingkup Pusdik KP (%)	49
Tabel 3.10	Tabel Realisasi Anggaran per Jenis Belanja Pusat Pendidikan KP	50
Tabel 3.11	Realisasi Anggaran per Sasaran Kegiatan per 31 Maret 2025	50



DAFTAR GAMBAR

Gambar I	Hasil capaian Kinerja Pusat Pendidikan KP Triwulan I Tahun 2025 pada tampilan web:kinerjaku.kkp.go.id	vii
Gambar 1.1	Susunan Keanggotaan Tim Kerja Lingkup Pusat Pendidikan KP Tahun 2025	4
Gambar 1.2	Sebaran UPT Pendidikan KP	9
Gambar 1.3	Keragaan Pegawai Pusat Pendidikan KP	10
Gambar 1.4	Sebaran Pegawai UPT Pendidikan KP	10
Gambar 3.1	Gambar Capaian Kinerja Pusat Pendidikan KP Triwulan I Tahun 2024	21
Gambar 3.2	Capaian Kinerja Pusat Pendidikan KP Triwulan I Tahun 2025 pada tampilan web:kinerjaku.kkp.go.id	22
Gambar 4.1	Hasil Capaian Kinerja Pusat Pendidikan KP Triwulan I Tahun 2024 pada tampilan web:kinerjaku.kkp.go.id	53



RINGKASAN EKSEKUTIF

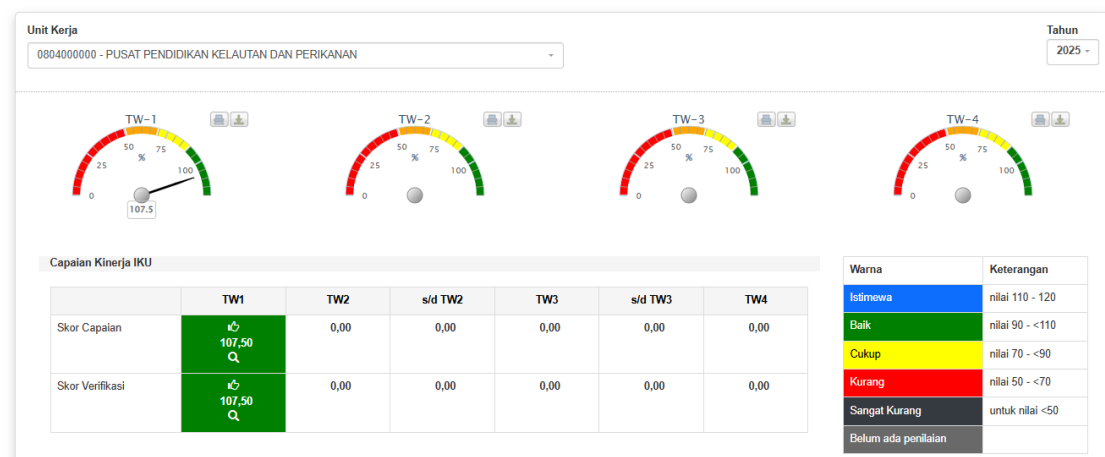
Pusat Pendidikan KP mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pendidikan kelautan dan perikanan sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan tanggal 10 Februari 2025. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Pusat Pendidikan KP menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program penyelenggaraan pendidikan kelautan dan perikanan;
- b. penyusunan tata kelola penyelenggaraan pendidikan kelautan dan perikanan;
- c. pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan kelautan dan perikanan;
- d. pelaksanaan penyelenggaraan tugas belajar dan tugas belajar mandiri pegawai negeri sipil Kementerian;
- e. pelaksanaan peningkatan serapan lulusan pendidikan kelautan dan perikanan;
- f. pelaksanaan pengelolaan lulusan pendidikan kelautan dan perikanan;
- g. koordinasi pelaksanaan kemitraan nasional dan internasional untuk peningkatan penyelenggaraan pendidikan kelautan dan perikanan;
- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan kelautan dan perikanan; dan
- i. pelaksanaan urusan administrasi Pusat Pendidikan KP.

Susunan organisasi Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan terdiri atas: (a) Subbagian Tata Usaha, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan ketatausahaan pada Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan; dan (b) jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Arah dan kebijakan KKP Tahun 2025 dilaksanakan dengan prinsip ekonomi biru sebagaimana tuntutan pembangunan global, terdiri atas : (1) Memperluas kawasan konservasi laut; (2) Penangkapan ikan terukur berbasis kuota penangkapan ikan; (3) Pengembangan perikanan budi daya di laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan; (4) Pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan (5) Pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan atau bulan cinta laut, dimana Pusat Pendidikan KP dan Satuan Pendidikan KP berkontribusi dalam kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan tersebut melalui peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia kelautan dan perikanan, utamanya di bidang pendidikan kelautan dan perikanan.

Perjanjian Kinerja Pusat Pendidikan KP Tahun 2025 telah ditetapkan pada 24 Januari 2025, yang terdiri dari 6 Sasaran Kegiatan dan 28 Indikator Kinerja. Laporan Kinerja Pusat Pendidikan KP Triwulan I Tahun 2025 berisikan tentang capaian atas target yang telah ditetapkan di Triwulan I Tahun 2025. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi Indikator Kinerja (*Key Performance Indicator*, disingkat KPI), dengan bantuan perangkat lunak melalui <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian kinerja Pusdik KP Triwulan I Tahun 2025 sebesar 107.50%



Periode Triwulan I Tahun 2025, terdapat 3 indikator kinerja yang sudah terealisasi, antara lain :

1. IK Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Pusat Pendidikan KP (%), dengan target tahunan adalah 85%, target triwulan I adalah 85%, dan capaian sebesar 85%, dengan persentase capaian adalah 100%;
2. IK Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Pusat Pendidikan KP (%), dengan target tahunan adalah 80%, target triwulan I adalah 80%, dan capaian sebesar 80%, dengan persentase capaian adalah 120%;
3. IK Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lingkup Pusat Pendidikan KP (%), dengan target tahunan adalah 100%, target triwulan I adalah 22%, dan capaian sebesar 22%, dengan persentase capaian adalah 100%.

Secara umum, kinerja Pusat Pendidikan KP pada triwulan I cukup baik, namun hal yang perlu diperhatikan untuk peningkatan kinerja adalah Indikator Kinerja yang memiliki target tahunan tetap harus dimonitor perkembangan pelaksanaan kegiatan, agar target akhir tahun dapat dicapai dengan baik.

BAB I

Latar Belakang

Tujuan

Tugas dan Fungsi

Potensi dan Permasalahan

Keragaman SDM

Sistematika Laporan Kinerja

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang – Undang No 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 mendukung perwujudan Visi Indonesia Emas 2045, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Selanjutnya, melalui Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029, menjabarkan **Visi Presiden periode 2025-2029 yaitu "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045"**. Visi ini dicapai melalui **Delapan Misi Presiden** yang dituangkan dalam **Delapan Asta Cita**, yaitu :

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Arah dan kebijakan KKP Tahun 2025 dilaksanakan dengan prinsip ekonomi biru sebagaimana tuntutan pembangunan global terdiri atas:

1. Memperluas kawasan konservasi laut;
2. Penangkapan ikan terukur berbasis kuota penangkapan ikan;
3. Pengembangan perikanan budi daya di laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan;
4. Pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
5. Pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan atau bulan cinta laut.

Arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan tersebut akan diperkuat dengan 3 poin, dimana BPPSDM KP, khususnya Pusdik berkontribusi pada poin ke 3 yaitu **peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia kelautan dan perikanan** melalui pendidikan vokasi yang didukung secara aktif oleh 10 Politeknik KP, 1 Akademi Komunitas, dan 5 Sekolah Usaha Perikanan Menengah yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia

Program dan Kegiatan Pusat Pendidikan KP Tahun 2024 merupakan pelaksanaan dari Rencana Kerja KKP Tahun 2025, Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) Pusat Pendidikan KP Tahun 2025, dan Perjanjian Kinerja Pusat Pendidikan KP Tahun 2025

B. Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Pusat Pendidikan KP Triwulan I Tahun 2025 bertujuan untuk :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur atas capaian pelaksanaan kegiatan Triwulan I Tahun 2025;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Pusat Pendidikan KP untuk meningkatkan kinerjanya.

C. Tugas dan Fungsi

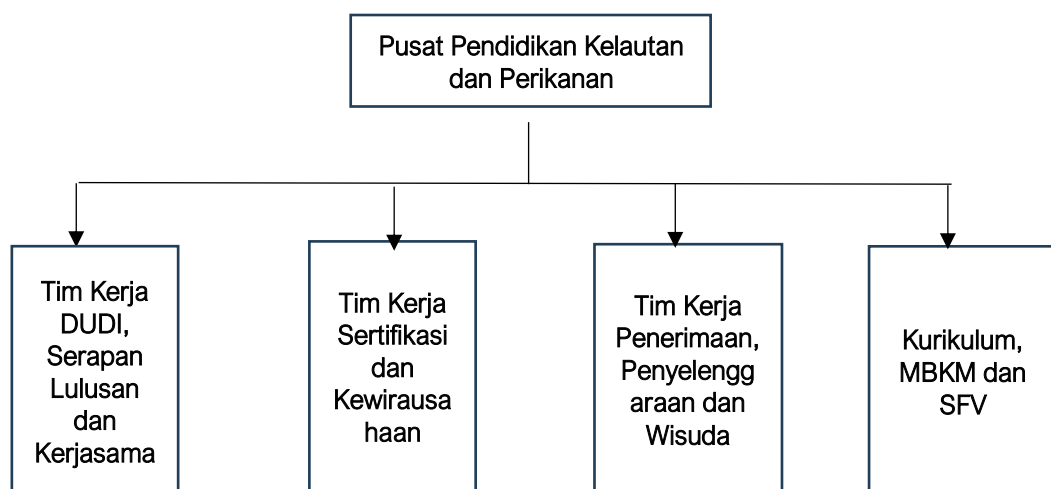
Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pusat Pendidikan berada di bawah unit eselon I Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia KP (BPPSDM KP).

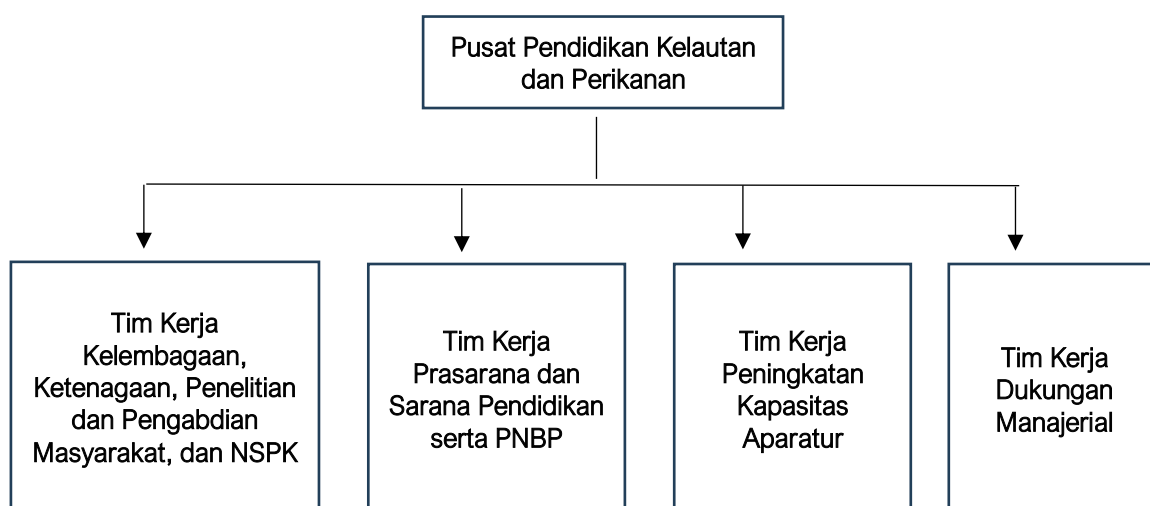
Pusat Pendidikan KP mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan kelautan dan perikanan. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Pusat Pendidikan KP menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program penyelenggaraan pendidikan kelautan dan perikanan;
- b. penyusunan tata kelola penyelenggaraan pendidikan kelautan dan perikanan;
- c. pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan kelautan dan perikanan;
- d. pelaksanaan penyelenggaraan tugas belajar dan tugas belajar mandiri pegawai negeri sipil Kementerian;
- e. pelaksanaan peningkatan serapan lulusan pendidikan kelautan dan perikanan;
- f. pelaksanaan pengelolaan lulusan pendidikan kelautan dan perikanan;
- g. koordinasi pelaksanaan kemitraan nasional dan internasional untuk peningkatan penyelenggaraan pendidikan kelautan dan perikanan;
- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan kelautan dan perikanan; dan
- i. pelaksanaan urusan administrasi Pusat Pendidikan KP.

Dalam melaksanakan fungsi tersebut, Kepala Pusat Pendidikan KP berpedoman pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2023 tentang Mekanisme Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan menetapkan Surat Tugas Nomor: B.18/BPPSDM.3/KP.440/I/2025 tanggal 2 Januari 2025 tentang Susunan Keanggotaan Tim Kerja Lingkup Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan, sebagai berikut :

Gambar 1.1. Susunan Keanggotaan Tim Kerja Lingkup Pusat Pendidikan KP Tahun 2025





Adapun uraian fungsi dari masing – masing tim kerja (timja) adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Uraian Fungsi Tim Kerja Pusat Pendidikan KP

No	Tim Kerja	Uraian Fungsi
1	Tim Kerja DUDI, Serapan Lulusan dan Kerjasama	a. Membangun dan memelihara hubungan dengan lembaga pendidikan, industri, dan organisasi non-pemerintah untuk meningkatkan program pendidikan b. Mengidentifikasi peluang kerjasama baru yang dapat mendukung pengembangan kurikulum dan praktik pendidikan. c. Berkontribusi dalam penyusunan kebijakan teknis dan rencana strategis terkait pendidikan kelautan dan perikanan. d. Mengembangkan pedoman operasional untuk implementasi program kerjasama. e. Mengorganisir kegiatan pendidikan vokasi yang melibatkan kolaborasi dengan mitra eksternal, seperti pelatihan, seminar, dan workshop. f. Memfasilitasi pertukaran informasi dan pengalaman antara institusi pendidikan kelautan dan perikanan. g. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program kerjasama untuk memastikan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. h. Menyusun laporan evaluasi untuk menilai efektivitas kerjasama serta memberikan rekomendasi perbaikan Merencanakan kegiatan dan anggaran serta menyusun data kegiatan tim Kerja Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Kepala Pusat Pendidikan KP / Ketua Tim Kerja
2	Tim Kerja Sertifikasi dan Kewirausahaan	Koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan kompetisi kewirausahaan peserta didik, pendampingan kewirausahaan, data lulusan satuan pendidikan KP yang melakukan rintisan wirausaha, laporan kegiatan kewirausahaan. Koordinasi, persiapan dan penyusunan data lulusan, serapan lulusan dan alumni

No	Tim Kerja	Uraian Fungsi
		Koordinasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi / keahlian peserta didik, laporan data kegiatan pemantauan dan evaluasi. Merencanakan kegiatan dan anggaran serta pemantauan dan evaluasi kegiatan tim kerja Menginisiasi dan melaksanakan kerjasama sertifikasi dan kewirausahaan Menyusun data kegiatan tim Kerja Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Kepala Pusat Pendidikan KP / Ketua Tim Kerja
3	Tim Kerja Penerimaan, Penyelenggaraan dan Wisuda	Koordinasi, persiapan dan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru, koordinasi pelantikan taruna baru, dan koordinasi pemberian bantuan biaya pendidikan a. Koordinasi penyelenggaraan pendidikan vokasi KP, penyelenggaraan pendidikan karakter dan wisuda b. Penyusunan pedoman terkait penyelenggaraan pendidikan KP, pedoman pentaru, pedoman pelantikan taruna baru, wisuda dan pedoman pakaian seragam taruna Merencanakan kegiatan dan anggaran serta pemantauan dan evaluasi kegiatan tim kerja Menginisiasi dan melaksanakan kerjasama penerimaan, penyelenggaraan dan wisuda Menyusun data kegiatan tim Kerja Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Kepala Pusat Pendidikan KP / Ketua Tim Kerja
4	Tim Kerja Kurikulum, MBKM dan SFV	a. Koordinasi penyiapan dan penyusunan dokumen metode dan buku kurikulum serta legalisasi b. Koordinasi persiapan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan Laporan hasil pembelajaran, penyelenggaraan teaching factory, workshop, laboratorium, perpustakaan dan unit instalasi pendukung praktek MBKM Merencanakan kegiatan dan anggaran serta pemantauan dan evaluasi kegiatan tim kerja Menginisiasi dan melaksanakan kerjasama Kurikulum, MBKM Menyusun data kegiatan tim Kerja Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Pusat Pendidikan KP / Ketua Tim Kerja
5	Tim Kerja Kelembagaan, Ketenagaan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, dan NSPK	a. Legislasi NSPK Pendidikan Kelautan dan Perikanan. b. Koordinasi terkait transformasi kelembagaan pendidikan KP menuju Ocean Institute of Indonesia (Dokumen Persyaratan Usul OII) Koordinasi, pendampingan penyiapan dan pelaksanaan, serta pemantauan penjaminan mutu pendidikan KP (akreditasi program keahlian/program studi). Pelaksanaan Bulan Mutu Pendidikan Tinggi Pelaksanaan Bulan Mutu Pendidikan Menengah Merencanakan, koordinasi persiapan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi Penelitian Terapan Pendidikan Tinggi KP. Seminar Nasional, Tata Kelola Lembaga Penelitian, Inovasi dan PKM

No	Tim Kerja	Uraian Fungsi
		Merencanakan, koordinasi persiapan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi Pengabdian Kepada Masyarakat Pendidikan Tinggi KP
		Merencanakan, koordinasi persiapan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi Transformasi Digital Pendidikan KP
		Merencanakan kegiatan dan anggaran serta pemantauan dan evaluasi kegiatan tim kerja
		Menyusun data kegiatan tim Kerja
		Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Pusat Pendidikan KP / Ketua Tim Kerja
6	Tim Kerja Prasarana dan Sarana Pendidikan serta PNB	a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan standar sarana prasarana pendidikan tinggi dan menengah kelautan dan perikanan; b. melakukan inventarisasi sarana prasarana pendidikan secara berkala dan menetapkan status keadaan baik, rusak ringan, dan rusak berat; c. menganalisis kebutuhan sarana prasarana pendidikan dan rencana pemenuhan kebutuhan yang mendukung penyelenggaraan pendidikan; d. melakukan pemantauan pelaksanaan pembangunan / rehabilitasi / renovasi gedung dan bangunan, pengadaan peralatan dan mesin, serta pengadaan sarana teknologi informasi dan komunikasi; e. melakukan pemantauan pemanfaatan, pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana gedung bangunan dan sarana pendidikan; f. melakukan koordinasi penetapan sumber penerimaan fungsional PNB satuan kerja pendidikan tinggi dan menengah serta pemantauan realisasi penerimaan; g. melakukan koordinasi penetapan dan persetujuan maksimal pencairan (MP) PNB satuan kerja pendidikan tinggi dan menengah serta pemantauan realisasi pemanfaatan; h. menyusun laporan capaian kinerja bulanan, semester, dan tahunan tim kerja sarana prasarana pendidikan dan PNB; i. melaksanakan urusan administrasi atau pertanggungjawaban kegiatan dan anggaran tim kerja sarana prasarana pendidikan dan PNB lingkup Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan j. Instrumen Monev Pelaksanaan MP-PNB Merencanakan kegiatan dan anggaran serta pemantauan dan evaluasi kegiatan tim kerja Menginisiasi dan melaksanakan kerjasama Prasarana dan Sarana Pendidikan serta PNB Menyusun data kegiatan tim Kerja Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Kepala Pusat Pendidikan KP / Ketua Tim Kerja
7	Tim Kerja Peningkatan Kapasitas Aparatur	Koordinasi, seleksi penerima beasiswa, pembayaran beasiswa, pelaksanaan Test TPA dan Toefl, layanan tugas belajar, telaah penyelenggaraan tugas belajar,

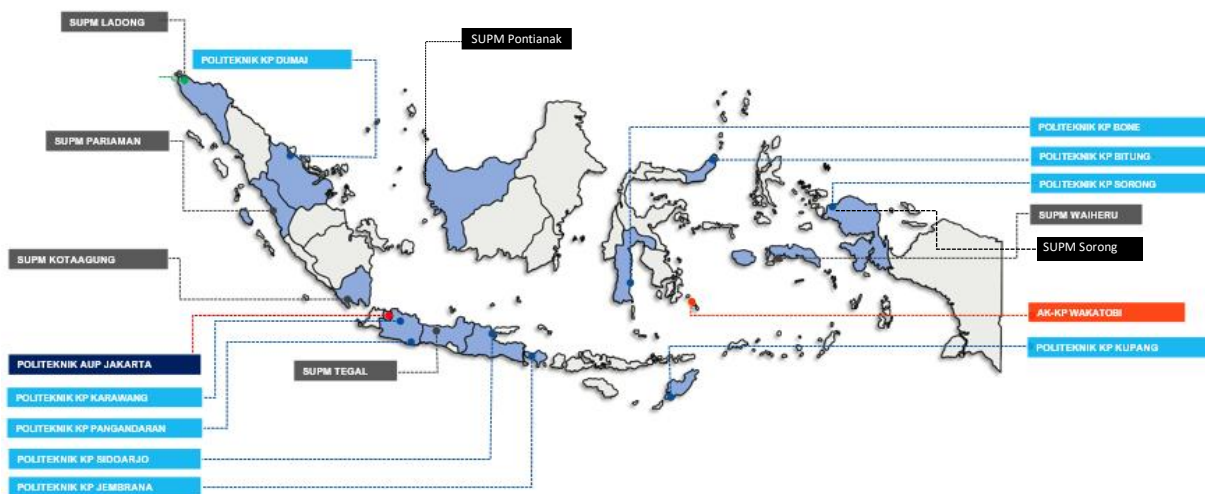
No	Tim Kerja	Uraian Fungsi
		pemantauan dan pelaporan pelaksanaan tugas belajar.
		Koordinasi, verifikasi usulan rekomendasi dan penyusunan rekomendasi tugas belajar dalam negeri dan luar negeri, pemantauan dan pelaporan pelaksanaan rekomendasi tugas belajar
		Koordinasi, verifikasi, penyusunan rekomendasi izin belajar, layanan izin belajar, pemantauan dan pelaporan pelaksanaan izin belajar.
		Melaksanakan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan melalui pembaharuan data, analisis kompetensi, evaluasi beban kerja, pemenuhan kebutuhan dosen, pemberian rekomendasi mutasi, serta persiapan penghargaan bagi guru dan dosen berprestasi.
		Merencanakan kegiatan dan anggaran serta pemantauan dan evaluasi kegiatan tim kerja
		Menginisiasi dan melaksanakan kerjasama Peningkatan Kapasitas Aparatur
		Menyusun data kegiatan tim Kerja dan mengkoordinasikan data pendidikan aparatur KKP
		Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan
8	Tim Kerja Dukungan Manajerial	Koordinasi dan pendampingan penyusunan, reviu, finalisasi dokumen unit kerja pendidikan kelautan dan perikanan yang lolos penilaian menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Koordinasi, identifikasi dan pendampingan penyusunan, reviu, finalisasi dokumen unit kerja pendidikan kelautan dan perikanan, menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Koordinasi dan penyiapan bahan dokumen keuangan dan umum Pusdik KP Koordinasi dan layanan informasi kegiatan peningkatan kualitas profesi ASN Lingkup Pusat Pendidikan KP a. Koordinasi, layanan dan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, penyiapan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kegiatan dan anggaran pendidikan kelautan dan perikanan b. Koordinasi, penyiapan bahan dan pelaksanaan, perencanaan program, penetapan harga satuan peserta didik, kegiatan dan anggaran pendidikan kelautan dan perikanan c. Koordinasi, penyiapan bahan dan pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kegiatan dan anggaran pendidikan kelautan dan perikanan d. Koordinasi, penyiapan bahan dan layanan kepegawaian dan kinerja organisasi Pusat Pendidikan KP Koordinasi, penyusunan dokumen kinerja, dan pengawalan target kinerja Pendidikan KP sesuai dengan aturan dan kaidah. Koordinasi dan pemantauan pelaksanaan penerapan Manajemen Pengetahuan yang Terstandar di Pusdik KP dan Satuan Pendidikan KP a. Koordinasi dan penyelesaian hasil pengawasan b. Pengelolaan dan Implementasi BMN

No	Tim Kerja	Uraian Fungsi
		c. Fasilitasi dan pengelolaan layanan kearsipan dan persuratan Pusdik KP
		Koordinasi, penyiapan bahan usulan, dan pendampingan unit kerja yang menerapkan inovasi pelayanan publik
		Koordinasi dan pelaksanaan dukungan manajerial internal Pusat Pendidikan KP
		Merencanakan kegiatan dan anggaran serta pemantauan dan evaluasi kegiatan tim kerja
		Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Kepala Pusat Pendidikan KP / Ketua Tim Kerja

D. Keragaan Sumber Daya Manusia Pusat Pendidikan KP

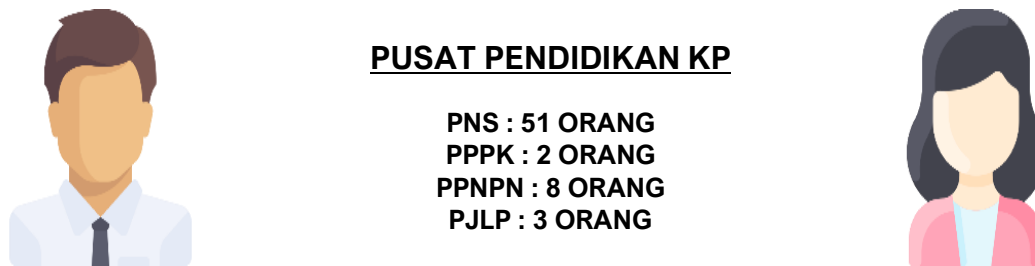
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Pusat Pendidikan KP dibantu oleh 18 Satuan Pendidikan, dengan total jumlah pegawai sebanyak 64 orang di Pusat Pendidikan KP dan 1.594 orang di seluruh satuan pendidikan KP. Khusus untuk SUPM Sorong dan SUPM Pontianak, karena masih dalam proses transisi kelembagaan, maka sudah tidak melaksanakan proses belajar mengajar dan hanya melaksanakan kegiatan manajerial, Berikut sebaran UPT Pendidikan KP sebanyak 18 unit kerja sebagaimana berikut :

Gambar 1.2 Sebaran UPT Pendidikan KP

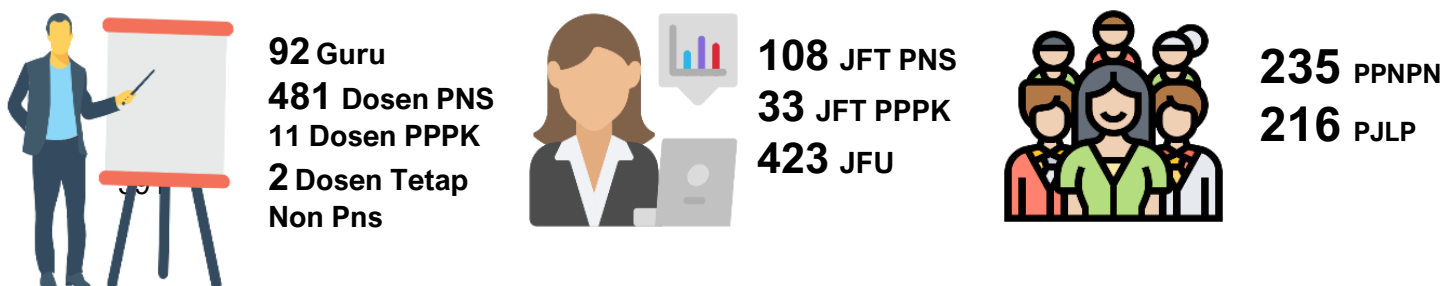


Rincian keragaan pegawai Pusat Pendidikan KP Tahun 2025 dan lingkup UPT Pendidikan KP dapat dilihat pada infografis berikut ini :

Gambar 1.3 Keragaan Pegawai Pusat Pendidikan KP



Gambar 1.4 Sebaran Pegawai UPT Pendidikan KP



E. Sistematika Laporan Kinerja

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Pusat Pendidikan KP adalah :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
10. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 91 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025.

Adapun sistematika penyajian laporan sebagai berikut:

1. **Ringkasan Eksekutif**, pada bagian ini berisi ringkasan dari laporan ini, antara lain berisi uraian singkat tentang tujuan, sasaran, capaian kinerja dan kendala selama Triwulan I Tahun 2025.
2. **Bab I Pendahuluan**, pada bab ini berisi hal-hal umum tentang Pusat Pendidikan KP seperti tugas dan fungsi serta struktur organisasi Pusat Pendidikan KP.
3. **Bab II Penetapan Perjanjian Kinerja**, pada bab ini uraian singkat tentang Rencana Kerja Pusat Pendidikan KP Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Pusat Pendidikan KP Tahun 2025 serta Pengukuran Kinerja.
4. **Bab III Akuntabilitas Kinerja**, bab ini dijelaskan hasil capaian kinerja selama Triwulan I Tahun 2025 dari indikator-indikator kinerja yang telah diuraikan pada bab sebelumnya disertai beberapa capaian indikator kinerja lainnya.
5. **Bab IV Penutup**, bab ini berisi uraian singkat terkait Kesimpulan, Permasalahan dan Rekomendasi.
6. **Lampiran**

F. Potensi dan Permasalahan

Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan memiliki 18 Satuan Pendidikan, yang terdiri atas 10 (sepuluh) Politeknik KP, 7 (Tujuh) Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) dan 1 (satu) Akademi Komunitas, dengan pendidik berjumlah 586 orang terdiri atas 92 guru, 481 dosen, 11 dosen P3K, dan 2 dosen tetap Non PNS, dalam menyelenggarakan kegiatan pendidikan dengan pendekatan *teaching factory* dengan 80% praktek dan 20% teori. Satuan Pendidikan Tinggi yang berada di bawah pembinaan Pusdik KP merupakan

pendidikan vokasi yang diarahkan pada penguasaan keahlian terapan tertentu, mencakup program pendidikan Diploma I (D1), Diploma III (D3) dan Diploma IV (D4) serta pascasarjana terapan dengan **program studi unggulan** meliputi Agribisnis KP, Budidaya Air Payau, Kapal Perikanan, Penangkapan Ikan, Pengolahan Ikan, Perikanan Air Payau, Budidaya Laut, Kelautan, dan Ekowisata Bahari serta Konservasi. Satuan Pendidikan Menengah terdiri dari 5 Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) dengan **program keahlian unggulan** Nautika Penangkapan Ikan, Budidaya Air Tawar, Budidaya Air Payau, Budidaya Laut, dan Pengolahan Perikanan. Lulusan pendidikan pada Satuan Pendidikan KP telah dilengkapi dengan sertifikasi berbagai bidang keahlian. Selain itu terdapat juga unit kerja SUPM Pontianak dan SUPM Sorong yang hanya melaksanakan fungsi manajerial untuk operasional dan pemeliharaan perkantoran.

Namun, dibalik potensi Pusat Pendidikan KP, **ada permasalahan dan tantangan** yang dihadapi dalam pelaksanaan program pendidikan untuk mendukung pembangunan KP antara lain:

1. Belum terbangun sebuah sinergi terintegrasi pemanfaatan hasil SDM oleh Unit Teknis KKP dalam merealisasikan program prioritas KKP khususnya program prioritas pembangunan sektor KP;
2. Belum optimalnya *link and match* instansi pemerintah, perguruan tinggi, serta dunia usaha dan industri kerja (DUDIKA) untuk meningkatkan kapasitas SDM KP yang dapat membuka peluang terhadap pemanfaatan bersama aset/sumber daya (*resource sharing*) dan serapan lulusan;
3. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) bidang Pendidikan KP sebagai instrumen penjaminan mutu dan pengembangan SDM yang masih kurang;
4. Sarpras pendidikan KP belum sepenuhnya terstandar sesuai kebutuhan dunia usaha dan industri kerja (DUDIKA).

BAB II

Rencana Strategis

Rencana Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Pengukuran Kinerja

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP) Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah lima Tahunan yang bersifat indikatif, memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi BPPSDM, yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) 2025-2029, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045, dan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025- 2029 dan dapat ditinjau ulang sesuai aturan yang berlaku.

Dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Periode 2025-2029, yang ditetapkan untuk mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden **“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”** serta pencapaian sasaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Periode 2025-2045, sektor kelautan dan perikanan memiliki peran yang sangat besar dalam Trisula Pembangunan sebagai kerangka pikir untuk menurunkan kemiskinan ekstrem hingga 0%, pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 8%, serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam Rancangan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 adalah **“Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan Sebagai Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan untuk Mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”**. Pusat Pendidikan selaku Unit Kerja dibawah KKP dan BPPSDM KP dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya mendukung Visi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM) yaitu **“Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong untuk mewujudkan Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045.”**

Dalam pencapaian visi tersebut, Pusat Pendidikan KP mendukung BPPSDM melaksanakan **2 dari 8 Misi/Asta Cita** yang dirumuskan sebagai berikut:

1. **Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berasal dari sektor kelautan dan perikanan serta mewujudkan swasembada pangan yang merata di sentra- sentra produksi kelautan dan perikanan**” yang menjabarkan **Misi Asta Cita 2**, memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
2. **“Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan”** yang menjabarkan **Misi Asta Cita 4**, memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas .

Tujuan Pusat Pendidikan KP yang diharapkan adalah penjabaran lebih lanjut dari Visi dan Misi KKP dan BPPSDM KP dalam rangka mencapai Sasaran Strategis pembangunan kelautan dan perikanan 2025 – 2029 adalah:

1. Menghasilkan SDM berkualitas dan berdaya saing guna mewujudkan pembangunan sektor KP berkelanjutan.
2. Memperluas akses pendidikan dengan berbasis digital/teknologi (*e-learning*) bagi anak pelaku utama pada satuan pendidikan kelautan dan perikanan.
3. Menjadikan Satuan Pendidikan KP sebagai pusat rujukan (*center of excellence*) oleh Satuan Pendidikan di Indonesia.
4. Menyelenggarakan fungsi kelembagaan dan menajerial SDM secara efektif dan efisien.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Pusat Pendidikan KP.

Sasaran Kegiatan yang akan dicapai Pusat Pendidikan KP pada Tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja Pusat Pendidikan KP Tahun 2025, adalah sebagai berikut:

1. SK1 Terselenggaranya Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan yang Kompeten
2. SK2 Tersedianya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk Pendidikan Tinggi Kelautan dan Perikanan
3. SK3 Terselenggaranya Tata Kelola Pendidikan Kelautan dan Perikanan
4. SK4 Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendidikan Kelautan dan Perikanan yang Terstandar
5. SK5 Aparatur KKP yang Dididik dan Dilatih

6. SK6 Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

B. Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025

Rencana Kerja (RK) memuat seluruh rencana atau target kinerja yang hendak dicapai dalam satu tahun yang dituangkan dalam sejumlah indikator kinerja strategis yang relevan, untuk nantinya menjadi dasar penyusunan target pada indikator kinerja utama di PK Pusat Pendidikan KP dan cascading ke Satuan Pendidikan KP Tahun 2025. Berikut adalah Renja Pusat Pendidikan KP berdasarkan DIPA Awal Tahun 2025:

Tabel 2.1 Rencana Kerja Pusat Pendidikan KP Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	Target 2025	Alokasi Anggaran
1	Terselenggaranya Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan yang Kompeten	7.615 orang	Rp.136.049.072.000
2	Tersedianya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk Pendidikan Tinggi Kelautan dan Perikanan	50 Unit	Rp.3.958.000.000
3	Terselenggaranya Kegiatan Desa Perikanan Cerdas (Smart Fisheries Village) di lingkup Pendidikan Kelautan dan Perikanan	3 Unit	Rp. 1.050.000.000
4	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendidikan Kelautan dan Perikanan yang Terstandar	6 Unit	Rp.26.164.973.000
5	Terselenggaranya Tata Kelola Pendidikan Kelautan dan Perikanan	16 Layanan	Rp.21.575.600.000
6	Pendidikan dan Pelatihan Aparatur KKP	272 orang	Rp.8.500.000.000
7	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	19 Layanan	Rp.275.156.110.000
TOTAL			Rp.472.453.755.000

C. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025

Dalam upaya untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, visi dan misi BPPSDM harus menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan strategi. Berdasarkan, visi dan misi tersebut selanjutnya dirumuskan sasaran kegiatan Pusat Pendidikan KP yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Pusat Pendidikan KP Tahun 2025

Berikut adalah Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang ditandatangani 2 Januari 2025 oleh Plt Kepala Pusat Pendidikan KP dan Kepala BPPSDM KP :

Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja Pusat Pendidikan KP Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1	Terselenggaranya Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan Yang Kompeten	1	Peserta pendidikan kelautan dan perikanan yang terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri atau Dunia Kerja (Orang)	2.134
		2	Jumlah lulusan Satuan Pendidikan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Orang)	2.507
		3	Peserta pendidikan vokasi kelautan dan perikanan yang kompeten (Orang)	7.615
		4	Nilai PNBP satker lingkup Pusat Pendidikan KP (Rp. Miliar)	17,48
		5	Kerja sama lingkup Pusat Pendidikan KP yang disepakati (Kesepakatan)	32
		6	Persentase tindak lanjut kerja sama lingkup Pusat Pendidikan KP yang telah disepakati (%)	70
		7	Persentase lulusan satuan pendidikan yang bersertifikasi kompetensi (%)	100
		8	Persentase anak pelaku utama yang diterima sebagai peserta didik baru (%)	100
2	Tersedianya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk Pendidikan Tinggi Kelautan dan Perikanan	9	Persentase peserta didik yang mendukung program prioritas melalui Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) (%)	80
		10	Kajian Pendidikan Tinggi Kelautan dan Perikanan (Paket)	51
		11	Pengabdian Pendidikan Tinggi Kelautan dan Perikanan (Kelompok)	14
3	Terselenggaranya Tata Kelola Pendidikan Kelautan dan Perikanan	12	Tenaga Pendidik Kelautan dan Perikanan yang Tersertifikasi (Orang)	500
		13	Norma Standar Prosedur dan Kriteria Pendidikan kelautan dan Perikanan (NSPK)	6
		14	Kelembagaan Publik Pendidikan Kelautan dan Perikanan yang Terakreditasi (Lembaga)	16
		15	Lembaga Pendidikan Kelautan dan Perikanan yang terkelola (Lembaga)	16
4	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendidikan Kelautan dan Perikanan yang Terstandar	16	Peralatan dan Mesin Serta Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Bidang Pendidikan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Paket)	5
		17	Prasarana Pendidikan Menengah dan Tinggi Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Paket)	3
5	Aparatur yang Dididik dan Dilatih	18	Aparatur KKP yang Diberikan Beasiswa (Orang)	190
		19	Aparatur KKP yang Diberikan Izin Belajar (Orang)	82
		20	Aparatur KKP yang Diberikan Rekomendasi Tugas Belajar Dalam Negeri dan Luar Negeri (Orang)	85
6	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	21	Unit Kerja yang dibangun berpredikat WBK/WBBM di lingkup Satuan Pendidikan KP (unit kerja)	4
		22	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Pusat Pendidikan KP (%)	85
		23	Penilaian Mandiri SAKIP Pusat Pendidikan KP (Nilai)	82

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
		24	Indeks Profesionalitas ASN Pusat Pendidikan KP (Indeks)	87
		25	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Pusat Pendidikan KP (%)	80
		26	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pusat Pendidikan KP (%)	80
		27	Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan pada unit kerja lingkup Pusat Pendidikan KP (Proposal)	1
		28	Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lingkup Pusat Pendidikan KP (%)	100

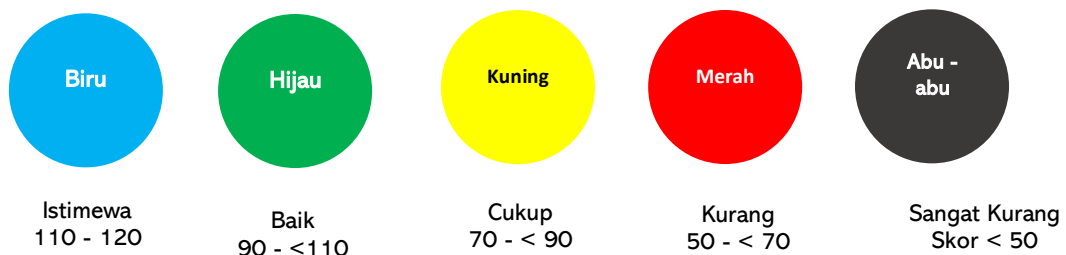
D. Pengukuran Kinerja

1. Rumus Pengukuran

Pengukuran capaian kinerja Pusat Pendidikan KP Triwulan I Tahun 2025, dilakukan dengan membandingkan antara target (rencana) kinerja dengan realisasi pada masing-masing indikator kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan mengacu kepada Manual IK pada masing-masing indikator.

Penghitungan indeks capaian IK perlu memperhitungkan jenis polarisasi IK yang berlaku yaitu maximize, minimize, dan stabilize. Ketentuan penetapan indeks capaian IK adalah:

1. Angka maksimum adalah 120;
2. Angka minimum adalah 0;
3. Formula penghitungan indeks capaian IK untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda;
4. Adapun status Indeks capaian IK adalah sebagai berikut:



2. Metode Pengukuran Kinerja

Metode pengukuran kinerja lingkup Pusat Pendidikan KP dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali (triwulanan), yaitu pada bulan Maret, Juni, September, dan Desember.

BAB III

Prestasi Indikator Kerja
Triwulan 1 2025

Evaluasi dan Analisis Kinerja

Akuntabilitas Keuangan

Efisiensi Anggaran

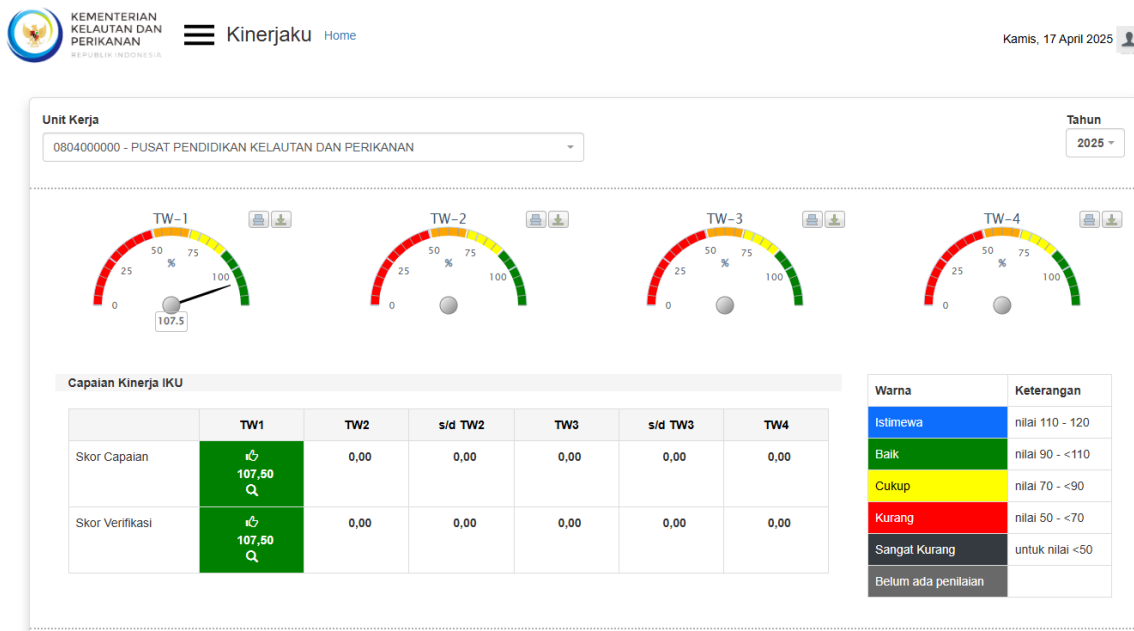
BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Prestasi Indikator Kinerja Kegiatan Triwulan I Tahun 2025

Pengukuran capaian kinerja Pusat Pendidikan KP Triwulan I Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak, yaitu melalui <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian kinerja Pusat Pendidikan KP di Tahun 2024 sebesar 107,50%, sebagaimana dashboard kinerjaku sebagai berikut:

Gambar 3.1. Gambar Capaian Kinerja Pusat Pendidikan KP Triwulan I Tahun 2025



Sesuai dengan Rincian Target IKU, maka target kinerja pada Triwulan I Tahun 2025 hanya 3 IK. Detail capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada gambar tangkapan layar dari aplikasi kinerjaku sebagai berikut :

Gambar 3.2. Capaian Kinerja Pusat Pendidikan KP Triwulan I Tahun 2025 pada web kinerjaku.kkp.go.id



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA



e-Kinerja Home

Kamis, 17 April 2025 

NKO Maret - 2025

Download

Unit Kerja : PUSAT PENDIDIKAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Skor Kinerja : 107.50

- Pastikan pada data dukung sudah terdapat tanda ✓
- Jika masih terdapat tanda ✗, silahkan file-nya di upload kembali, dengan cara pilih tombol 
- Jika masih ada data dukung lain, data dukung masih dapat ditambahkan dengan cara pilih tombol Tambah Data Dukung+

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Polarisasi	Perhitungan	Target 2025	Target Maret	Capaian Maret	%	Target s/d Maret	Capaian s/d Maret	%	Tgl Input
SK.01	Terselenggaranya Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan yang Kompeten											
IKSK.1	Peserta Pendidikan Kelautan dan Perikanan yang Terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri, atau Dunia Kerja Tambah Data Dukung+	Orang	Maximize	Nilai Posisi Akhir	2.134,00	0,00			0,00	0,00		15-Apr-2025 16:27
IKSK.2	Jumlah lulusan Satuan Pendidikan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Orang) Tambah Data Dukung+	Orang	Maximize	Nilai Posisi Akhir	2.507,00	0,00			0,00	0,00		15-Apr-2025 16:27
IKSK.3	Peserta pendidikan vokasi kelautan dan perikanan yang kompeten (Orang) Tambah Data Dukung+	Orang	Maximize	Nilai Posisi Akhir	7.615,00	0,00			0,00	0,00		15-Apr-2025 16:27
IKSK.4	Nilai PNBP Satker lingkup Pusat Pendidikan KP (Rp. Miliar) Tambah Data Dukung+	Rp. Miliar	Maximize	Nilai Posisi Akhir	17,48	0,00			0,00	0,00		15-Apr-2025 16:27
IKSK.5	Kerja sama lingkup Pusat Pendidikan KP yang disepakati (Kesepakatan) Tambah Data Dukung+	Kesepakatan	Maximize	Nilai Posisi Akhir	32,00	0,00			0,00	0,00		15-Apr-2025 16:27
IKSK.6	Persentase tindak lanjut kerja sama lingkup Pusat Pendidikan KP yang telah disepakati (%) Tambah Data Dukung+	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	70,00	0,00			0,00	0,00		15-Apr-2025 16:27
IKSK.7	Persentase Lulusan Satuan Pendidikan yang Bersertifikasi Kompetensi (%) Tambah Data Dukung+	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	100,00	0,00			0,00	0,00		15-Apr-2025 16:27
IKSK.8	Persentase anak pelaku utama yang diterima sebagai peserta didik baru (%) Tambah Data Dukung+	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	100,00	0,00			0,00	0,00		15-Apr-2025 16:27
IKSK.9	Persentase peserta didik yang mendukung program prioritas melalui Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) (%) Tambah Data Dukung+	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	80,00	0,00			0,00	0,00		15-Apr-2025 16:27
SK.02	Tersedianya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk Pendidikan Tinggi Kelautan dan Perikanan											
IKSK.02.1	Kajian Pendidikan Tinggi Kelautan dan Perikanan (Paket) Tambah Data Dukung+	Paket	Maximize	Nilai Posisi Akhir	51,00	0,00			0,00	0,00		15-Apr-2025 16:27
IKSK.02.2	Pengabdian Pendidikan Tinggi Kelautan dan Perikanan (Kelompok) Tambah Data Dukung+	Kelompok	Maximize	Nilai Posisi Akhir	14,00	0,00			0,00	0,00		15-Apr-2025 16:27

NKO Maret - 2025

[Download](#)

Unit Kerja : PUSAT PENDIDIKAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Skor Kinerja : 107.50

- Pastikan pada data dukung sudah terdapat tanda ✓
- Jika masih terdapat tanda ✗, silahkan file-nya di upload kembali, dengan cara pilih tombol 
- Jika masih ada data dukung lain, data dukung masih dapat ditambahkan dengan cara pilih tombol Tambah Data Dukung 

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Polarisasi	Perhitungan	Target 2025	Target Maret	Capaian Maret	%	Target s/d Maret	Capaian s/d Maret	%	Tgl Input
SK.03	Terselenggaranya Tata Kelola Pendidikan Kelautan dan Perikanan											
IKSK.03.1	Tenaga Pendidik Kelautan dan Perikanan yang Tersertifikasi (Orang) Tambah Data Dukung 	Orang	Maximize	Nilai Posisi Akhir	500,00	0,00			0,00	0,00		15-Apr-2025 16:27
IKSK.03.2	Norma Standar Prosedur dan Kriteria Pendidikan kelautan dan Perikanan (NSPK) Tambah Data Dukung 	NSPK	Maximize	Nilai Posisi Akhir	6,00	0,00			0,00	0,00		15-Apr-2025 16:27
IKSK.03.3	Kelembagaan Publik Pendidikan Kelautan dan Perikanan yang Terakreditasi (Lembaga) Tambah Data Dukung 	Lembaga	Maximize	Nilai Posisi Akhir	16,00	0,00			0,00	0,00		15-Apr-2025 16:27
IKSK.03.4	Lembaga Pendidikan Kelautan dan Perikanan yang dikelola (Lembaga) Tambah Data Dukung 	Lembaga	Maximize	Nilai Posisi Akhir	16,00	0,00			0,00	0,00		15-Apr-2025 16:27
SK.04	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendidikan Kelautan dan Perikanan yang Terstandar											
IKSK.04.1	Peralatan dan Mesin Serta Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Bidang Pendidikan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Paket) Tambah Data Dukung 	Paket	Maximize	Nilai Posisi Akhir	5,00	0,00			0,00	0,00		15-Apr-2025 16:27
IKSK.04.2	Prasarana Pendidikan Menengah dan Tinggi Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Paket) Tambah Data Dukung 	Paket	Maximize	Nilai Posisi Akhir	3,00	0,00			0,00	0,00		15-Apr-2025 16:27
SK.05	Aparatur KKP yang Dididik dan Dilatih											
IKSK.05.1	Aparatur KKP yang Diberikan Beasiswa (Orang) Tambah Data Dukung 	Orang	Maximize	Nilai Posisi Akhir	190,00	0,00			0,00	0,00		15-Apr-2025 16:27
IKSK.05.2	Aparatur KKP yang Diberikan Izin Belajar (Orang) Tambah Data Dukung 	Orang	Maximize	Nilai Posisi Akhir	82,00	0,00			0,00	0,00		15-Apr-2025 16:27
IKSK.05.3	Aparatur KKP yang Diberikan Rekomendasi Tugas Belajar Dalam Negeri dan Luar Negeri (Orang) Tambah Data Dukung 	Orang	Maximize	Nilai Posisi Akhir	85,00	0,00			0,00	0,00		15-Apr-2025 16:27
SK.06	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan							107,50		107,50		
IKSK.06.1	Unit Kerja yang dibangun berpredikat WBK/WBBM di lingkup Satuan Pendidikan KP (unit kerja) Tambah Data Dukung 	Unit Kerja	Maximize	Nilai Posisi Akhir	4,00	0,00			0,00	0,00		15-Apr-2025 16:27
IKSK.06.2	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Pusat Pendidikan KP (%) Tambah Data Dukung  Data Dukung1 	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	85,00	85,00	85,00	100,00	85,00	85,00	100,00	15-Apr-2025 16:27

NKO Maret - 2025

Download

Unit Kerja : PUSAT PENDIDIKAN KELAUTAN DAN
PERIKANAN

Skor Kinerja : 107.50

- Pastikan pada data dukung sudah terdapat tanda ✓
- Jika masih terdapat tanda ✗, silahkan file-nya di upload kembali, dengan cara pilih tombol
- Jika masih ada data dukung lain, data dukung masih dapat ditambahkan dengan cara pilih tombol Tambah Data Dukung

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Polarisasi	Perhitungan	Target 2025	Target Maret	Capaian Maret	%	Target s/d Maret	Capaian s/d Maret	%	Tgl Input
SK.06	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan						107,50			107,50		
IKSK.06.3	Penilaian Mandiri SAKIP Pusat Pendidikan KP Tambah Data Dukung	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	82,00	0,00			0,00	0,00		15-Apr-2025 16:27
IKSK.06.4	Indeks Profesionalitas ASN Pusat Pendidikan KP (Indeks) Tambah Data Dukung	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	87,00	0,00			0,00	0,00		15-Apr-2025 16:27
IKSK.06.5	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Pusat Pendidikan KP (%) Tambah Data Dukung Data Dukung1	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	80,00	80,00	100,00	120,00	80,00	100,00	120,00	15-Apr-2025 16:27
IKSK.06.6	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pusat Pendidikan KP (%) Tambah Data Dukung	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	80,00	0,00			0,00	0,00		15-Apr-2025 16:27
IKSK.06.7	Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan pada unit kerja lingkup Pusat Pendidikan KP Tambah Data Dukung	Proposal	Maximize	Nilai Posisi Akhir	1,00	0,00			0,00	0,00		15-Apr-2025 16:27
IKSK.06.8	Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lingkup Pusat Pendidikan KP (%) Tambah Data Dukung Data Dukung1 Data Dukung2	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	100,00	22,00	22,00	100,00	22,00	22,00	100,00	15-Apr-2025 16:27
Tutup												

sumber : kinerjaku.kkp.go.id

B. Evaluasi dan Analisis Kinerja Utama

Pelaksanaan evaluasi dan analisis kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi BPPSDM KP.

Penjabaran Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1. Target dan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 Pusat Pendidikan KP

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET	CAPAIAN	%
1	Terselenggaranya Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan Yang Kompeten	1	Peserta pendidikan kelautan dan perikanan yang terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri atau Dunia Kerja (Orang)	0	0	-
		2	Jumlah lulusan Satuan Pendidikan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Orang)	0	0	-
		3	Peserta pendidikan vokasi kelautan dan perikanan yang kompeten (Orang)	0	0	-
		4	Nilai PNBP satker lingkup Pusat Pendidikan KP (Rp. Miliar)	0	0	-
		5	Kerja sama lingkup Pusat Pendidikan KP yang disepakati (Kesepakatan)	0	0	-
		6	Persentase tindak lanjut kerja sama lingkup Pusat Pendidikan KP yang telah disepakati (%)	0	0	-
		7	Persentase lulusan satuan pendidikan yang besertifikasi kompetensi (%)	0	0	-
		8	Persentase anak pelaku utama yang diterima sebagai peserta didik baru (%)	0	0	-
2	Tersedianya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk Pendidikan Tinggi Kelautan dan Perikanan	9	Persentase peserta didik yang mendukung program prioritas melalui Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) (%)	0	0	-
		10	Kajian Pendidikan Tinggi Kelautan dan Perikanan (Paket)	0	0	-
		11	Pengabdian Pendidikan Tinggi Kelautan dan Perikanan (Kelompok)	0	0	-
3	Terselenggaranya Tata Kelola Pendidikan Kelautan dan Perikanan	12	Tenaga Pendidik Kelautan dan Perikanan yang Tersertifikasi (Orang)	0	0	-
		13	Norma Standar Prosedur dan Kriteria Pendidikan kelautan dan Perikanan (NSPK)	0	0	-

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET	CAPAIAN	%
		14	Kelembagaan Publik Pendidikan Kelautan dan Perikanan yang Terakreditasi (Lembaga)	0	0	-
		15	Lembaga Pendidikan Kelautan dan Perikanan yang terkelola (Lembaga)	0	0	-
4	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendidikan Kelautan dan Perikanan yang Terstandar	16	Peralatan dan Mesin Serta Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Bidang Pendidikan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Paket)	0	0	-
		17	Prasarana Pendidikan Menengah dan Tinggi Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Paket)	0	0	-
5	Aparatur yang Dididik dan Dilatih	18	Aparatur KKP yang Diberikan Beasiswa (Orang)	0	0	-
		19	Aparatur KKP yang Diberikan Izin Belajar (Orang)	0	0	-
		20	Aparatur KKP yang Diberikan Rekomendasi Tugas Belajar Dalam Negeri dan Luar Negeri (Orang)	0	0	-
6	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	21	Unit Kerja yang dibangun berpredikat WBK/WBBM di lingkup Satuan Pendidikan KP (unit kerja)	0	0	-
		22	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Pusat Pendidikan KP (%)	85	85	100,00
		23	Penilaian Mandiri SAKIP Pusat Pendidikan KP (Nilai)	0	0	-
		24	Indeks Profesionalitas ASN Pusat Pendidikan KP (Indeks)	0	0	-
		25	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Pusat Pendidikan KP (%)	80	100,00	120,00
		26	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pusat Pendidikan KP (%)	0	0	-

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET	CAPAIAN	%
		27	Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan pada unit kerja lingkup Pusat Pendidikan KP (Proposal)	0	0	-
		28	Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lingkup Pusat Pendidikan KP (%)	22	22	100,00

sumber : kinerjaku.kkp.go.id

Sasaran Kegiatan 1

Terselenggaranya Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan Yang Kompeten

Indikator Kinerja Utama 1

Peserta pendidikan kelautan dan perikanan yang terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri atau Dunia Kerja (Orang)

Indikator ini mengukur sejauh mana lulusan Pendidikan KP mampu mendapatkan pekerjaan, merintis/mengembangkan usaha dan atau terlibat dalam kegiatan produktif di sektor usaha, industri dunia kerja yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dunia Usaha (SKDU) dari Kelurahan/Surat Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)/Surat Izin Tempat Usaha (SITU)/Nomor Induk Berusaha (NIB)/surat keterangan bekerja/kartu pegawai/Kartu KUSUKA/perjanjian kerja/SK Kelompok/foto produk, media penjualan dan harga jual. IKU ini diukur semesteran, dengan target tahunan sebanyak 2.134 orang. Sampai dengan triwulan I, kegiatan yang sudah dilakukan dalam mendukung IKU ini antara lain :

1. Satuan pendidikan KP menjalin komunikasi kepada alumni melalui media sosial untuk memberikan update informasi terkait lowongan perusahaan;
2. Lulusan satuan pendidikan KP tidak hanya dibekali oleh Ijazah tetapi juga sertifikat kompetensi keahlian sehingga menjadi nilai tambah bagi para alumni dalam mencari pekerjaan yang sesuai di bidangnya;
3. Pendataan kerja sama dengan dunia usaha / dunia industri guna memudahkan pendataan untuk penyerapan alumni.

Indikator Kinerja Utama 2

Jumlah lulusan Satuan Pendidikan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Orang)

Output dari proses pembelajaran adalah lulusan yang memiliki kompetensi dan potensi diri mereka sudah berkembang dengan maksimal, sehingga siap untuk menghadapi tantangan baru setelah menyelesaikan pendidikan dengan jenjang tertentu. Kompetensi merupakan pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak yang bersifat dinamis, berkembang dan dapat diraih setiap waktu. Kompetensi ini dibuktikan dengan sertifikat yang dimiliki oleh peserta didik satuan pendidikan KP selama menempuh pendidikan 1, 3, atau 4 tahun di satuan pendidikan KP.

Pengukuran IKU ini dilakukan semesteran, dengan target tahunan sebanyak 2.507 orang. Sampai dengan triwulan I, kegiatan yang sudah dilakukan adalah Ujian Sekolah dan Ujian Kompetensi Keahlian yang dilakukan di Bulan Maret 2025 untuk lingkup SUPM, dan proses belajar mengajar dan PKL untuk lingkup Politeknik dan Akademi Komunitas.

Indikator Kinerja Utama 3

Peserta pendidikan vokasi kelautan dan perikanan yang kompeten (Orang)

Peserta didik merupakan salah satu dari komponen pendidikan yang tidak bisa ditinggalkan, karena tanpa adanya peserta didik tidak akan mungkin proses pembelajaran dapat berjalan. Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Menurut Sudarwan Danim (2010: 1) “Peserta didik merupakan sumber utama dan terpenting dalam proses pendidikan formal”. Peserta didik bisa belajar tanpa guru. Sebaliknya, guru tidak bisa mengajar tanpa adanya peserta didik. Oleh karena itu kehadiran peserta didik menjadi keniscayaan dalam proses pendidikan formal atau pendidikan yang dilembagakan dan menuntut interaksi antara pendidik dan peserta didik.

Tugas inilah yang diemban oleh Pusat Pendidikan dan Satuan Pendidikan KP, mengembangkan peserta didik sesuai potensi mereka yang tepat di dunia kelautan dan perikanan. KKP memiliki 5 SUPM (Sekolah Usaha Perikanan Menengah/ setara dengan SMK) yang masih aktif, 1 Akademi Komunitas, dan 10 Politeknik Kelautan dan Perikanan

yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian, satuan pendidikan KP memiliki program studi/ program keahlian yang sesuai dengan permintaan di dunia usaha/ dunia industri, dengan garis besar program studi/ keahliannya antara lain penangkapan ikan, budidaya perikanan/ kelautan, permesinan kapal, dan pengolahan hasil produk kelautan/ perikanan.

Periode pengukuran IKU ini adalah semester, dengan target tahunan sebanyak 7.615 orang. Sampai dengan triwulan I, jumlah peserta didik dari 16 satuan pendidikan KP yang masih aktif adalah sebanyak 7.491 orang. Tabel berikut menggambarkan jumlah peserta didik dari seluruh satuan pendidikan KP periode Triwulan I Tahun 2025 :

Tabel 3.2. Jumlah peserta didik pada Satuan Pendidikan lingkup KKP pada TA 2024/2025

No	Satuan Kerja	Jumlah
1	Politeknik AUP	2.854
2	Politeknik KP Sidoarjo	580
3	Politeknik KP Bitung	493
4	Politeknik KP Sorong	375
5	Politeknik KP Karawang	279
6	Politeknik KP Bone	659
7	Politeknik KP Kupang	524
8	Politeknik KP Dumai	277
9	Politeknik KP Pangandaran	268
10	Politeknik KP Jembrana	363
11	AK Wakatobi	42
12	SUPM Ladong	107
13	SUPM Pariaman	180
14	SUPM Kotaagung	94
15	SUPM Tegal	217
17	SUPM Waiheru	179
Total		7.491

Sampai dengan triwulan I, kegiatan yang sudah dilakukan dalam mendukung IK ini adalah penerimaan penerimaan taruna baru di Pusat Pendidikan KP yang sudah diumumkan melalui website <https://pentaru.kkp.go.id/>. Selain itu, di satuan pendidikan KP juga sedang dilaksanakan proses belajar mengajar.

Indikator Kinerja Utama 4

Nilai PNBP Satker Lingkup Pusat Pendidikan KP (Rp. Miliar)

Pada dasarnya, penerimaan negara terbagi atas 2 jenis penerimaan, yaitu penerimaan dari **pajak** dan penerimaan bukan pajak yang disebut **penerimaan negara bukan pajak (PNBP)**.

Menurut UU No. 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.

UU tersebut juga menyebutkan kelompok PNBP meliputi:

- a. penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana Pemerintah;
- b. penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam;
- c. penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan;
- d. penerimaan dari pelayanan yang dilaksanakan Pemerintah
- e. penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi;
- f. penerimaan berupa hibah yang merupakan hak Pemerintah
- g. penerimaan lainnya yang diatur dalam Undang-undang tersendiri

Nilai Jenis Penerimaan Negara Bukan pajak yang berlaku pada KKP dan terdiri dari PNBP Sumber Daya Alam (SDA), PNBP Lainnya (Non SDA), dan PNBP BLU. Sesuai PP 85 Tahun 2022 terdiri dari pemanfaatan sumber daya alam perikanan dan pendidikan kelautan dan perikanan. Selain itu, ada juga pendapatan penjualan hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan budidaya, dan juga pendapatan biaya pendidikan.

Periode pengukuran IKU ini adalah tahunan, dengan target tahunan sebesar Rp. 17,48M. Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, PNBP yang sudah disetorkan ke negara adalah sebesar Rp.3.969.109.291 (22,70%), dengan rincian pendapatan fungsional sebesar Rp.1.385.859.481 dan non fungsional sebesar Rp.2.583.249.810

Indikator Kinerja Utama 5

Kerja sama lingkup Pusat Pendidikan KP yang disepakati (Kesepakatan)

Jejaring adalah jalinan asosiasi/forum/organisasi lainnya yang memiliki kesamaan profesi/kepakaran yang diikuti oleh Satker/ UPT lingkup. Kerja sama lingkup Pusat Pendidikan KP adalah penyelenggaraan kerja sama antara Pusat Pendidikan KP atau Satuan Pendidikan KP dengan pihak mitra pada tahun berjalan yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan ruang lingkup meliputi:

1. Penelitian, pengembangan dan penerapan IPTEK;
2. Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan;

3. Pertukaran ilmu pengetahuan, teknologi, tenaga ahli dan material penelitian;
4. Perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan hasil litbang;
5. Diseminasi dan publikasi;
6. Pertemuan ilmiah, seminar bersama dan lokakarya bersama;
7. Peningkatan pelayanan publik atas ilmu pengetahuan dan teknologi.

Periode pengukuran IKU ini adalah tahunan, dengan target tahunan sebanyak 32 dokumen. Sampai dengan triwulan I, kerja sama yang sudah disepakati sebanyak 7 dokumen, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.3 Dokumen Kerjasama yang sudah Disepakati

No	Satuan Pendidikan	Mitra Kerjasama	Nomor BPPSDM	Tanggal	Judul Kerjasama	Ruang Lingkup Kerjasama
1	Politeknik AUP	PT SEJAHTERA FALAM INDONESIA	NOMOR: 21/BPPSDM/ KKP/PKS/II/2025	3 Februari 2025	Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	1. Pengembangan pendidikan dan sumber daya manusia meliputi penyelenggaraan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), yaitu Prkatik Akhir, Praktik Lapang dan Kegiatan Magang, terkait dengan Praktik Teknologi Akuakultur dan Agrikultur secara umum 2. Penyerapan Lulusan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan Pihak Kedua
2	Politeknik AUP	PT MEGA BARUNA FISHERIES	NOMOR: 21/BPPSDM/ KKP/PKS/II/2025	3 Februari 2025	Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	Pengembangan pendidikan dan sumber daya manusia meliputi penyelenggaraan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)
3	Politeknik KP Bitung	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	NOMOR: 7/BPPSDM/ KKP/PKS/II/2025	4 Februari 2025	Penyelenggaraan Program	1. Pemberian Akses dan fasilitas penyelenggaraan

No	Satuan Pendidikan	Mitra Kerjasama	Nomor BPPSDM	Tanggal	Judul Kerjasama	Ruang Lingkup Kerjasama
		KABUPATEN PARIGI MOUTONG			Pengembangan SDM KP	pendidikan KP bagi putra-putri pelaku utama perikanan dan pemangku kepentingan lainnya; 2. Fasilitasi menyelenggarakan pendidikan KP bagi pemangku kepentingan; 3. Pemberian akses pelatihan KP bagi pemangku kepentingan.
4	Politeknik KP Sorong	PT CITRA RAJA AMPAT CANNING SORONG	NOMOR: 4/BPPSDM/ KKP/PKS/I/2025	30 januari 2025	Penyerapan Lulusan serta Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi Bidang KP	1. Peningkatan kapasitas dan kualitas produk perikanan berstandar Internasional (MSC); 2. Penyediaan dan pendayagunaan prasarana dan tenaga masing – masing Pihak; 3. Penyerapan lulusan dan alumni Politeknik KP Sorong sesuai ketentuan yang berlaku
5	Politeknik KP Sorong	PT SINAR ABADI CEMERLANG SEMARANG	NOMOR: 3/BPPSDM/ KKP/PKS/I/2025	30 januari 2025	Peningkatan Kompetensi SDM KP serta Penyerapan Lulusan	1. Penyediaan fasilitas pendukung pendidikan bagi taruna/l Politeknik KP Sorong; 2. Pengembangan pendidikan dan pelatihan dengan bimbingan teknis, lokakarya, dan seminar bidang perikanan, PKL; 3. Penyerapan lulusan dan alumni Politeknik KP Sorong sesuai ketentuan yang berlaku

No	Satuan Pendidikan	Mitra Kerjasama	Nomor BPPSDM	Tanggal	Judul Kerjasama	Ruang Lingkup Kerjasama
6	Politeknik KP Jembrana	PT SPIRALIFE BIOTEKNOLOGI INDONESIA	NOMOR: 13/BPPSDM/ KKP/PKS/II/2025	10 Februari 2025	Kegiatan Penelitian	Penelitian dan Publikasi Bersama
7	Politeknik KP Jembrana	THE INTERNATIONAL INSTITUTE OF KNOWLEDGE MANAGEMENT, SRI LANKA	NOMOR: 14/BPPSDM/ KKP/PKS/II/2025	4 Februari 2025	<i>Joint Collaboration To Support The 12th International Conference On Fisheries And Aquaculture 2025 (Icfa 2025)</i>	<i>1. Support the of the 12th International Conference on Fisheries and Aquaculture 2025 (ICFA 2025) to be held from 30th – 31st October 2025 Bangkok, Thailand (hereinafter referred to as the Conference).</i> <i>2. Facilitate an effective platform to share the knowledge, whilst empowering participants through providing a solid platform for them to present their research findings to a global audience</i>

Indikator Kinerja Utama 6

Persentase tindak lanjut kerja sama lingkup Pusat Pendidikan KP yang telah disepakati (%)

Indikator Kinerja ini menunjukkan jumlah kerjasama yang ditindaklanjuti dibandingkan dengan jumlah kerjasama yang masih berlaku dan ditargetkan untuk ditindaklanjuti pada tahun 2025. Periode pengukuran IK ini adalah tahunan, dengan target pada tahun 2025 adalah 70%, dan sampai dengan triwulan I sudah tercapai 15% (atau 15 dokumen dari target 94 dokumen)

Indikator Kinerja Utama 7

Persentase Lulusan Satuan Pendidikan yang Besertifikasi Kompetensi (%)

IK ini adalah indikator yang menunjukkan jumlah peserta didik tingkat akhir yang telah disertifikasi kompetensinya dalam rangka persiapan bekerja di bidang kelautan dan perikanan, dibandingkan dengan jumlah peserta didik yang diusulkan mengikuti ujian sertifikasi kompetensi pada tahun berjalan.

Periode pengukuran IK ini adalah tahunan, dengan target sebesar 100%. IK ini diturunkan ke seluruh satuan pendidikan KP. Sampai dengan triwulan I, kegiatan yang sudah dilakukan dalam mendukung IK ini adalah pelaksanaan ujian keterampilan keahlian (UKK) lingkup satuan pendidikan menengah KP / SUPM KP, dan pelaksanaan proses belajar mengajar di satuan pendidikan tinggi KP. Jumlah calon lulusan untuk satuan pendidikan menengah adalah sebanyak 515 orang dan pendidikan tinggi sebanyak 2.010 orang, dengan total sebanyak 2.525 orang

Indikator Kinerja Utama 8

Persentase Anak Pelaku Utama yang Diterima sebagai Peserta Didik Baru (%)

Sebagai salah satu upaya dalam pemerataan pendidikan, maka Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Pusat Pendidikan KP memiliki kebijakan dalam proses penerimaan peserta didik baru di satuan pendidikan KP. Penerimaan peserta didik baru dilaksanakan melalui 2 (dua) jalur penerimaan, yakni jalur umum dan jalur khusus. Jalur umum adalah sistem seleksi penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan lingkup KKP yang diperuntukkan bagi calon peserta didik dari masyarakat umum. Jalur khusus adalah sistem penerimaan peserta didik dari anak pelaku utama, yang dimaksud pelaku utama adalah masyarakat yang mata pencaharian utamanya sebagai nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, petambak garam, dan pemasar perikanan.

IK ini adalah indikator yang menunjukkan jumlah anak pelaku utama yang diterima sebagai peserta Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan. Periode pengukuran IKU ini adalah tahunan, dengan target adalah 100%. Satuan pendidikan KP melakukan seleksi penerimaan taruna baru secara terpusat melalui pentaru.kkp.go.id untuk pendidikan tinggi, dan pentaru.kkp.go.id/supm/ untuk pendidikan menengah KP, dan kuota penerimaan peserta didik baru untuk Satuan Pendidikan Tinggi KP sudah tercantum dalam pengumuman penerimaan yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Pusat Pendidikan KP melalui Nomor B.725/BPPSDM.3/RSDM.410/III/2025 tanggal 10 Maret 2025 perihal Penerimaan Peserta Didik pada Satuan Pendidikan Tinggi Vokasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Akademik 2024/2025. Kuota yang tercantum sebanyak 1.650 orang, sementara untuk satuan pendidikan menengah / SUPM KP sesuai dengan pengumuman oleh Plt. Kepala Pusat Pendidikan KP No. B.726/BPPSDM.3/RSDM.410/III/2025 tanggal 10 Maret 2025, kuota penerimaannya

adalah 487 orang. Pentaru ini sudah *dilaunching* oleh Menteri KP dan Wakil Menteri KP pada 3 Maret 2025 di Politeknik AUP.

Indikator Kinerja Utama 9

Persentase Peserta Didik yang Mendukung Program Prioritas melalui Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) (%)

IK ini merupakan indikator yang menunjukkan jumlah peserta didik yang terlibat dalam Program Prioritas KKP melalui Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) adalah program yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan untuk bekal memasuki dunia kerja.

Pendidikan vokasi kelautan dan perikanan melalui Politeknik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan kegiatan MBKM di lokasi Program Prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan, yaitu Penangkapan Ikan Secara Terukur dan Peningkatan Produksi Perikanan melalui Budidaya Ikan melalui MBKM ini. Periode pengukuran IK ini adalah tahunan, dengan target tahunan sebesar 80%. IK ini hanya diukur di Pusat Pendidikan KP. Sampai dengan triwulan I, berdasarkan data sementara, ada 515 taruna yang mendukung Program Penangkapan Ikan Terpadu (PIT)

Sasaran Kegiatan 2

Tersedianya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk Pendidikan Tinggi Kelautan dan Perikanan

Indikator Kinerja Utama 10

Kajian Pendidikan Tinggi Kelautan dan Perikanan (Paket)

Sebagai bagian dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang bergerak di bidang pendidikan, maka satuan pendidikan tinggi KP mengemban tugas untuk mendukung visi dan misi KKP serta mengemban tanggung jawab dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi: Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Indikator ini menunjukkan jumlah paket kajian pendidikan tinggi dalam bentuk penelitian yang dilaksanakan secara terpusat dan oleh satuan pendidikan KP.

Periode pengukuran IK ini adalah tahunan, dengan target sebanyak 51 paket. Sampai dengan triwulan I, kegiatan yang sudah dilakukan oleh satuan pendidikan KP adalah mencari mitra kerjasama dari pihak luar, khususnya dalam hal pembiayaan, dikarenakan untuk biaya APBN terkena efisiensi anggaran sesuai dengan instruksi Presiden No 1

Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Indikator Kinerja Utama 11

Pengabdian Pendidikan Tinggi Kelautan dan Perikanan (Kelompok)

Pengabdian Pendidikan Tinggi Kelautan dan Perikanan adalah kegiatan pengabdian yang dilakukan dengan memberikan contoh langsung dan diuji cobakan oleh kelompok pelaku usaha dan pelaku pendukung di sektor kelautan dan perikanan. Kegiatan ini merupakan bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang mencakup pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada kelompok pelaku usaha dan pelaku pendukung. Dalam konteks kelautan dan perikanan, kegiatan pengabdian berfokus pada pemberdayaan masyarakat pesisir dan pengembangan sektor kelautan serta perikanan yang berkelanjutan.

Acuannya yaitu Keputusan Kepala BPPSDMKP Nomor 719 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Terpusat pada Perguruan Tinggi Vokasi Lingkup BPPSDMKP. Tujuannya adalah untuk mendiseminasikan dan mengajarkan teknologi, metode, atau praktik yang lebih efektif, efisien, dan ramah lingkungan dalam kegiatan perikanan dan pengelolaan sumber daya laut

Periode pengukuran IK ini adalah tahunan, dengan target tahunan sebesar 14 Kelompok. Kegiatan yang sudah dilakukan oleh satuan pendidikan KP adalah mencari mitra kerjasama dari pihak luar, khususnya dalam hal pembiayaan, dikarenakan untuk biaya APBN terkena efisiensi anggaran sesuai dengan instruksi Presiden No 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Sasaran Kegiatan 3

Terselenggaranya Tata Kelola Pendidikan Kelautan dan Perikanan

Indikator Kinerja Utama 12

Tenaga Pendidik Kelautan dan Perikanan yang Tersertifikasi (Orang)

IKU ini adalah indikator yang menunjukkan jumlah tenaga pendidik yang mendapatkan sertifikasi profesi dan/atau yang ditingkatkan kompetensinya melalui kegiatan pelatihan teknis sesuai program studi/keahlian untuk mendukung proses

pembelajaran. Yang menjadi bagian dari target IKU ini adalah tenaga pendidik (dosen/guru) dan tenaga pendukung pendidikan seperti laboran, teknisi tambak, teknisi hatchery, dll yang mendukung proses pembelajaran

Periode pengukuran IKU ini adalah tahunan, dengan target sebanyak 500 orang. Kegiatan yang sudah dilakukan oleh satuan pendidikan KP adalah mencari pelatihan secara daring, dikarenakan untuk biaya APBN terkena efisiensi anggaran sesuai dengan instruksi Presiden No 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Indikator Kinerja Utama 13

Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria Pendidikan KP (Dokumen)

Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria yang selanjutnya disingkat NSPK adalah aturan atau ketentuan yang menjadi pedoman bagi satuan pendidikan KP dan penyelenggaranya untuk menjalankan penyelenggaraan pendidikan KP. Periode pengukuran IKU ini adalah tahunan, dengan target sebanyak 6 dokumen, dan sampai dengan Triwulan I, NSPK yang sudah ditandatangani oleh Kepala BPPSDM KP adalah:

1. Keputusan Kepala BPPSDM No.5 Tahun 2025 tentang Penetapan Peserta Didik Penerima Bantuan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Tinggi Vokasi KP di Lingkungan KKP
2. Keputusan Kepala BPPSDM No. 6 Tahun 2025 tentang Penetapan Peserta Didik Penerima Bantuan Biaya Pendidikan pada SUPM di Lingkungan KKP
3. Peraturan Kepala BPPSDM No. 1 Tahun 2025 tentang Penerimaan Peserta Didik di Satuan Pendidikan Tinggi Vokasi KKP
4. Peraturan Kepala BPPSDM No.2 Tahun 2025 tentang Penerimaan Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Vokasi KKP

Indikator Kinerja Utama 14

Kelembagaan Publik Pendidikan Kelautan dan Perikanan yang Terakreditasi (Lembaga)

Akreditasi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan Program Studi dan satuan pendidikan. Akreditasi Program Studi adalah kegiatan penilaian untuk

menentukan kelayakan Program Studi. Akreditasi satuan pendidikan adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan satuan pendidikan.

Akreditasi pada Pendidikan KP merupakan dampak mutu pendidikan KP yang terstandar, sehingga nilai mutu lembaga pendidikan dapat menjadi cerminan budaya mutu pada satuan pendidikan KP terselenggara dengan baik. Tahapan proses Akreditasi meliputi:

- a. evaluasi data dan informasi terkait mutu penyelenggaraan satuan pendidikan atau Program Studi;
- b. penetapan peringkat Akreditasi berdasarkan hasil evaluasi; dan
- c. pemantauan pemenuhan syarat peringkat Akreditasi.

Periode pengukuran IKU ini adalah tahunan, dengan target sebanyak 16 Lembaga. Sampai dengan triwulan I Tahun 2025, kegiatan yang sudah dilakukan adalah pengunggahan dokumen untuk reakreditasi, baik program studi maupun institusi ke dalam PDDIKTI, dan masih menunggu jadwal visitasi oleh assessor. Adapun satuan pendidikan yang sudah selesai proses akreditasi adalah SUPM Waiheru Status / Peringkat Akreditasi adalah A dan Program Studi Teknologi Budidaya Perikanan (TBP) Politeknik KP Bone dengan Peringkat Akreditasi Baik Sekali (11 Maret 2025 – 11 Maret 2030)

Indikator Kinerja Utama 15

Lembaga Pendidikan Kelautan dan Perikanan yang terkelola (Lembaga)

Lembaga pendidikan kelautan dan perikanan merupakan satuan pendidikan dibawah Kementerian Kelautan dan Perikanan yang terdiri dari 11 satuan pendidikan tinggi dan 5 satuan pendidikan menengah. Pengelolaan lembaga pendidikan ditujukan agar adanya keseragaman penyelenggaraan pendidikan oleh satuan pendidikan. Dalam rangka tersebut maka Pusat Pendidikan KP melaksanakan kegiatan secara terpusat untuk 16 satuan pendidikan. Kegiatan tersebut yaitu penerimaan peserta didik baru, pengadaan kartu taruna, pembinaan peserta didik, wisuda pendidikan menengah, wisuda pendidikan tinggi, biaya anak pelaku utama, VOGA Festival, penyelenggaraan sertifikasi, MBKM terpusat, pengendalian sarana prasarana satuan pendidikan, transformasi kelembagaan, pengelolaan ketenagaan, dan pelayanan publik.

Periode pengukuran IKU ini adalah tahunan, dengan target sebanyak 16 lembaga. Sampai dengan Triwulan I, kegiatan yang sedang dilakukan adalah proses penerimaan

taruna baru, MBKM terpusat, pengendalian sarana prasarana satuan pendidikan, transformasi kelembagaan, pengelolaan ketenagaan, dan pelayanan publik.

Sasaran Kegiatan 4

Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendidikan Kelautan dan Perikanan yang Terstandar

Indikator Kinerja Utama 16

Peralatan dan Mesin Serta Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Bidang Pendidikan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Paket)

Untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan pengajaran di satuan pendidikan KP, perlu juga ada peningkatan pada komponen prasarananya, salah satunya adalah peralatan dan mesin pendidikan serta teknologi informasi dan komunikasi bidang KP. IKU ini merupakan indikator yang menunjukkan paket pengadaan peralatan/mesin/meubelair/sarana/teknologi informasi dan komunikasi yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan KP. Paket pengadaan dikelompokkan berdasarkan sumber pendanaan yaitu rupiah murni, PNBK, BLU, SBSN dan hasil optimalisasi sisa kegiatan melalui proses revisi POK/DIPA yang masing-masing dihitung 1 paket.

Periode pengukuran IKU ini adalah tahunan, dengan target sebanyak 5 paket, yang diturunkan ke Politeknik KP Sidoarjo sebanyak 2 paket, Politeknik KP Karawang sebanyak 1 paket, Politeknik KP Dumai sebanyak 1 paket, dan SUPM Pariaman sebanyak 1 paket. Untuk anggaran di Politeknik KP Sidoarjo dan Politeknik KP Dumai, terkena efisiensi anggaran sesuai dengan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025. Adapun di Politeknik KP Karawang, berupa *Meubelair Simulator* dan *Fishing and Navigation Simulator* masih menunggu selesainya pembangunan gedung simulator. Adapun di SUPM Pariaman, sudah selesai dilaksanakan, berupa Pengadaan Pemasangan Instalasi CCTV sejumlah Rp.49.996.620 dengan Nomor BAST B.107/BAST/SUPM-PRM/PL.410/I/2025 tanggal 31 Januari 2025.

Indikator Kinerja Utama 17

Prasarana Pendidikan Menengah dan Tinggi Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Paket)

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), prasarana adalah “segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek, dan sebagainya)”. Sementara itu, Daryanto dalam Administrasi

Pendidikan mengatakan prasarana berarti alat tidak langsung untuk mencapai tujuan. Dalam pendidikan misalnya lokasi/tempat, bangunan sekolah, lapangan olahraga, uang, dan sebagainya.

Periode pengukuran IKU ini adalah tahunan, dengan target sebanyak 3 paket yang diturunkan ke Politeknik KP Sidoarjo sebanyak 1 paket, Politeknik KP Karawang sebanyak 1 paket, dan SUPM Pariaman sebanyak 1 paket. Untuk anggaran pengadaan di Politeknik KP Sidoarjo dan SUPM Pariaman terkena efisiensi anggaran sesuai dengan Inpres No. 1 Tahun 2025, dan untuk Politeknik KP Karawang adalah Pembangunan Gedung Simulator menggunakan biaya SBSN. Tahapan yang sudah dilakukan Politeknik KP Karawang sampai dengan triwulan I adalah proses penunjukan pemenang lelang konstruksi dan konsultan pengawas pembangunan.

Sasaran Kegiatan 5

Aparatur yang Dididik dan Dilatih

Indikator Kinerja Utama 18

Aparatur KKP yang diberikan beasiswa (Orang)

Salah satu upaya dalam peningkatan pengetahuan, kemampuan, dan profesionalisme ASN di KKP dilakukan melalui pendidikan formal dengan pemberian tugas belajar bagi aparatur Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk jenjang Pendidikan S1, S2, dan S3. Diharapkan, pemberian tugas belajar dapat meningkatkan kemampuan aparatur KKP dalam menganalisis, menyajikan hasil pelaksanaan tugas dengan baik, dan memberikan sumbangan pemikiran bagi perumusan kebijakan kementerian lebih lanjut.

Periode pengukuran untuk IKU ini adalah semesteran, dengan target tahunan sebesar 190 orang. Sampai dengan Triwulan I 2025, kegiatan yang sudah dilakukan adalah pembayaran biaya hidup peserta tubel sebanyak 156 orang untuk periode Januari - Juni 2025

Indikator Kinerja Utama 19

Aparatur KKP yang diberikan izin belajar (orang)

Salah satu upaya dalam peningkatan pengetahuan, kemampuan, dan profesionalisme ASN di KKP dilakukan melalui pendidikan formal dengan pemberian

rekomendasi izin belajar bagi aparatur Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk jenjang Pendidikan S1, S2, dan S3. Diharapkan, pemberian rekomendasi izin belajar dapat meningkatkan kemampuan aparatur KKP dalam menganalisis, menyajikan hasil pelaksanaan tugas dengan baik, dan memberikan sumbangan pemikiran bagi perumusan kebijakan kementerian lebih lanjut.

Periode pengukuran IKU ini adalah tahunan, dengan target tahunan sebanyak 82 orang. Anggaran untuk IKU ini terkena efisiensi anggaran sesuai dengan Inpres No. 1 Tahun 2025.

Indikator Kinerja Utama 20

Aparatur KKP yang Diberikan Rekomendasi Tugas Belajar Dalam Negeri dan Luar Negeri (Orang)

Salah satu dasar untuk menerbitkan Surat Keputusan Pegawai Tugas Belajar adalah pemberian rekomendasi oleh Kepala BPPSDM KP. IK ini merupakan indikator yang menunjukkan jumlah rekomendasi tugas belajar bagi Aparatur KKP yang melaksanakan tugas belajar baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Tugas belajar merupakan upaya dalam peningkatan pengetahuan, kemampuan, dan profesionalisme ASN di KKP dilakukan melalui pendidikan formal jenjang S2 dan S3.

Periode pengukuran adalah tahunan, dengan target tahunan sebesar 85 orang. Kegiatan yang sudah dilakukan dalam mendukung pencapaian IKU ini adalah menerbitkan rekomendasi tugas belajar baru dalam negeri dan luar negeri dan rekomendasi perpanjangan tugas belajar lanjutan sebanyak luar negeri 2 orang dan perpanjangan 3 orang.

Sasaran Kegiatan 7

Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

Indikator Kinerja 21

Unit Kerja yang dibangun berpredikat WBK/WBBM di lingkup Satuan Pendidikan KP (unit kerja)

Dalam rangka melakukan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di Lingkungan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Pusat Pendidikan KP mengusulkan 4 unit kerja pendidikan KP yang dibangun untuk diusulkan menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK), yaitu (1) Politeknik KP Sorong; (2) Politeknik KP Kupang, (3)

Politeknik KP Bone; dan (4) Politeknik KP Dumai. Periode pengukuran IKU ini adalah tahunan.

Sampai dengan Triwulan I 2025, kegiatan yang sudah dilakukan adalah pendampingan penilaian Satuan Pendidikan KP yang diusulkan WBK oleh Inspektorat Jenderal, dengan keterangan sebagai berikut :

1. Surat Dinas dari Inspektur III No. T.177/ITJ.3/HP.660/III/2025 tanggal 26 Maret 2025 hal Hasil Pendampingan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM pada Politeknik KP Kupang dengan nilai 16,74 dan belum memenuhi ambang batas penilaian WBK dari target minimal senilai 75,00;
2. Surat Dinas dari Inspektur III No. T.169/ITJ.3/HP.660/III/2025 tanggal 25 Maret 2025 hal Hasil Pendampingan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM pada Politeknik KP Dumai dengan nilai 86,99 dan telah memenuhi ambang batas penilaian WBK dari target minimal senilai 75,00;

Surat dinas ini merupakan hasil penilaian Inspektorat Jenderal untuk selanjutnya ditindaklanjuti dan dipenuhi kekurangan dokumen sebagaimana rekomendasi di dalam surat tersebut

Indikator Kinerja 22

Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pusat Pendidikan KP (%)

IK ini merupakan jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen (Audit, Reviu, dan Evaluasi). Capaian IK diperoleh dari jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang terbit LHP-nya pada periode 1 Oktober 2024 s.d. 31 Desember 2024 (Triwulan IV Tahun 2024) dan telah ditindaklanjuti secara tuntas oleh unit eselon I sampai dengan 31 Maret Tahun 2025 (Triwulan I Tahun 2025).

Tabel 3.4 Capaian IK 22 : Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pusat Pendidikan KP (%)

Sasaran Kegiatan 7 : Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan										
IK 22 : Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pusat Pendidikan KP (%)										
Realisasi Triwulan I				2025					Draf Rencana Kegiatan Pusdik 2025 - 2029	
2021	2022	2023	2024	Target Tahunan	Target TW I	Capaian TW I	% Capaian	% Kenaikan Capaian 2024 - 2025	Target 2029	% Capaian terhadap Target 2029
66,67	100	75	82	85	85	85	100,00	3,66	87	97,70

Per Triwulan I Tahun 2025, dari target IK sebesar 85%, berdasarkan Surat Dinas Sekretaris BPPSDM KP No B.3218/BPPSDM.1/HP.510/IV/2025 tanggal 14 April 2025, capaian Pusat Pendidikan KP adalah 85%, sesuai dengan target pada triwulan I Tahun 2025 sebesar 85%, dengan persentase capaian adalah 100,00%. Pusat Pendidikan KP tidak menjadi objek pengawasan Itjen, sehingga capaian adalah 85%, disamakan dengan target. Namun, selain itu, Pusat Pendidikan KP juga selalu berkoordinasi dengan Tim Itjen dan Tim Sekretariat BPPSDM KP, untuk mengawal pengawasan yang dilakukan oleh Tim Itjen.

Jika dibandingkan dengan capaian pada Triwulan I 2024 sebesar 82%, maka terjadi kenaikan capaian sebesar 3,66%. Hal ini disebabkan adanya kenaikan target pada 2025, sehingga dengan metode pengukuran dimana unit kerja yang tidak menjadi objek pengawasan, capaiannya disamakan dengan target, maka menyebabkan capaian 2025 menjadi lebih tinggi, yaitu dari 82% menjadi 85%. Capaian dari Tahun 2021 - 2024 pun bervariasi, dimana capaian pada Tahun 2021 adalah 66,67%, Tahun 2022 adalah 100%, dan Tahun 2023 adalah 75%. Jika dibandingkan dengan target Draf Rencana Kegiatan Pusdik Renstra, maka persentase capaian adalah 97,70%, dimana target tahun 2029 adalah 87%.

Kegiatan yang mendukung tercapainya IK adalah rapat dengan Biro Keuangan terkait tindak lanjut temuan, kemudian koordinasi dengan Tim Sekretariat BPPSDM KP dan Tim Itjen KP, dan mengirimkan surat dari Kapusdik KP kepada pimpinan unit kerja pendidikan KP dan Katimja lingkup Pusdik untuk menindaklanjuti rekomendasi temuan

Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja di level unit kerja internal BPPSDM KP, maka tabel berikut menggambarkan capaian kinerja di Pusat lingkup BPPSDM KP :

Tabel 3.5. Tabel Perbandingan Capaian Kinerja pada Level Unit Kerja Lingkup BPPSDM KP

No	Unit Kerja	Target	Capaian	Persentase Capaian (%)
1	Pusat Pendidikan KP	85%	85%	100,00%
2	Pusat Pelatihan KP	85%	85%	100,00%
3	Pusat Penyuluhan KP	85%	100%	117,65%

Apabila dilihat pada tabel di atas, capaian seluruh Pusat di lingkup BPPSDM KP sudah mencapai target dengan persentase capaian Pusat Pendidikan KP dan Pusat Pelatihan

KP adalah 100,00%, dan Pusat Penyuluhan KP sendiri sebesar 117,65%, dengan target sebesar 85% dan capaian sebesar 100%.

Indikator Kinerja 23

Penilaian Mandiri SAKIP Pusat Pendidikan KP (Nilai)

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, mengamanatkan Instansi pemerintah untuk lebih akuntabel dan lebih bertanggung jawab terhadap kinerja atau hasil yang telah dicapai. Akuntabilitas Kinerja sebagai suatu kondisi dimana instansi pemerintah telah merubah orientasinya dari yang biasanya berorientasi kepada anggaran (*input*) atau kegiatan (*output*) semata menjadi berorientasi kepada hasil atau *outcome*. Dalam rangka evaluasi tingkat akuntabilitas, BPPSDM KP selaku pembina dari Pusat/Balai lingkup BPPSDM KP akan melakukan evaluasi atas akuntabilitas kinerja pada Pusat Pendidikan KP.

Penilaian SAKIP di lingkup KKP menggunakan peraturan baru dengan terbitnya Permen PAN RB nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perubahan mendasar dalam penilaian SAKIP yaitu adanya penggabungan dan pembobotan dalam komponen penilaian, keselarasan cascading untuk melihat keselarasan kinerja organisasi, sistem *reward and punishment*, penambahan kriteria penilaian dari 5 menjadi 8 kriteria, serta orientasi penilaian lebih kearah dampak implementasi SAKIP atau *outcome*.

Periode pengukuran IK ini adalah tahunan, dengan target nilai sebesar 82. Sampai dengan Triwulan I 2025, kegiatan yang sudah dilakukan dalam mendukung pencapaian IK ini antara lain dengan penyusunan dokumen perencanaan yang selaras antara PK, Manual IKU, Rincian Target IKU, dan Rencana Aksi, serta melakukan reviu LKj 2024 yang sesuai dengan Permenpan RB No. 53 Tahun 2014.

Indikator Kinerja 24

Indeks Profesionalitas ASN Pusat Pendidikan KP (indeks)

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018). Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada

Peraturan BKN Nomor 8 tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dan Surat Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian Nomor 006/B-BM.02.01/SD/C/2023 tanggal 22 Mei 2023

Tujuan dari indikator kinerja ini adalah untuk mengukur profesionalitas ASN lingkup Pusat Pendidikan KP berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin. Perhitungan capaian indikator kinerja ini dilakukan dengan cara menghitung indeks berdasarkan bobot 4 (empat) komponen yang telah ditetapkan meliputi: (1) Kualifikasi (Bobot 25%); (2) Kompetensi (Bobot 40%); Kinerja (Bobot 30%) dan (4) Disiplin (Bobot 5%).

Periode pengukuran IK ini adalah semesteran, dengan target tahunan adalah 87. Kegiatan yang sudah dilakukan dalam mendukung IK ini adalah:

1. Penyelesaian SKP 2024 dan 2025;
2. Pegawai mengikuti peningkatan kompetensi melalui webinar untuk mendapatkan sertifikat.

Indikator Kinerja 25

Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Pusat Pendidikan KP (%)

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP.

Nilai ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1).

Tabel 3.6 Capaian IK 25 : Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Pusat Pendidikan KP (%)

Sasaran Kegiatan 7 : Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan										
IK 25 : Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Pusat Pendidikan KP (%)										
Realisasi Triwulan I				2025					Draf Rencana Kegiatan Pusdik 2025 - 2029	
2021	2022	2023	2024	Target Tahunan	Target TW I	Capaian TW I	% Capaian	% Kenaikan Capaian 2024 - 2025	Target 2029	% Capaian terhadap Target 2029
-	-	-	-	80	80	100,00	120,00	-	80	120,00

Per Triwulan I Tahun 2025, dari target IK sebesar 80%, berdasarkan Surat Dinas Sekretaris BPPSDM KP No B.3241/BPPSDM.1/PL.410/IV/2025 tanggal 15 April 2025, capaian Pusat Pendidikan KP adalah 100%, dengan persentase capaian adalah 120,00%. Ketercapaian IK ini tidak lepas dari kedisiplinan pengelola satker dan operator SIRUP dalam melakukan pembaruan data pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) secara berkala. IK ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena IK ini baru ada pada tahun 2025. Jika dibandingkan dengan target pada Draf Rencana Kegiatan Pusdik 2025 – 2029 sebesar 80%, maka persentase capaian adalah 120,00%

Kegiatan yang mendukung tercapainya IKU ini adalah adanya monitoring data pengadaan setiap saat oleh Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa SEKJEN KKP serta bagian PBJ BPPSDM KP.

Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja di level unit kerja internal BPPSDM KP, maka tabel berikut menggambarkan capaian kinerja di Pusat lingkup BPPSDM KP :

Tabel 3.7. Tabel Perbandingan Capaian Kinerja pada Level Unit Kerja Lingkup BPPSDM KP

No	Unit Kerja	Target	Capaian	Persentase Capaian (%)
1	Pusat Pendidikan KP	80	100	120,00
2	Pusat Pelatihan KP	80	100	120,00
3	Pusat Penyuluhan KP	80	100	120,00

Apabila dilihat pada tabel di atas, capaian seluruh Pusat di lingkup BPPSDM KP sudah melampaui target dengan persentase capaian seluruh Pusat adalah 120,00%.

Indikator Kinerja 26

Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pusat Pendidikan KP (%)

Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN, adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. BMN perlu ditatausahakan sesuai dengan tata kelola yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Membedah permasalahan yang jamak ditemui dalam pengelolaan BMN bila ditelusuri lebih jauh pintu masuknya bisa dengan melihat penatausahaannya di satker, yaitu proses pembukuan/pencatatan, inventarisasi, dan pelaporan. Kesalahan dalam penatausahaan BMN dapat dihindari apabila terbentuk kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Periode pengukuran IK ini adalah tahunan, dengan target adalah 80% Kegiatan yang sudah dilakukan dalam mendukung IK ini adalah pendataan BMN di Pusat Pendidikan KP secara berkala.

Indikator Kinerja 27

Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan pada Unit Kerja lingkup Pusat Pendidikan KP (Inovasi)

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB No. 7/2023, inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup satu pendekatan baru bersifat kontekstual baik berupa inovasi pelayanan publik hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada.

Periode pengukuran IK ini adalah tahunan, dengan target 1 Inovasi, dan diturunkan ke Politeknik KP Sidoarjo. Politeknik KP Sidoarjo mengajukan inovasi berupa *Online Single Submission* Politeknik KP Sidoarjo (ONE SEA) yaitu layanan secara online berbasis teknologi informasi yang mampu mengintegrasikan layanan pendidikan dalam satu sistem aplikasi yang *real time, accessible dan responsive*. ONE SEA melayani publik dalam satu pintu dan telah dijalankan melalui Android Playstore: Politeknik KP Sidoarjo dan web : <http://oss.poltekkpsidoarjo.ac.id/>.

Indikator Kinerja 28

Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lingkup Pusdik KP (%)

IK Layanan Dukungan Manajemen Internal meliputi antara lain layanan umum, layanan organisasi dan tata kelola internal, layanan kehumasan dan protokoler, layanan data dan informasi, pengelolaan keuangan dan kinerja internal, dan layanan perkantoran. Dokumen hasil layanan dapat berupa laporan, matrik, *screenshot* aplikasi yang bukan merupakan bukti capaian IK lain.

Tabel 3.8 Capaian IK 28 : Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lingkup Pusdik KP (%)

Sasaran Kegiatan 6 : Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan										
IK 28 : Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lingkup Pusdik KP (%)										
Realisasi Triwulan I				2025					Draf Rencana Kegiatan Pusdik 2025 - 2029	
2021	2022	2023	2024	Target Tahunan	Target TW I	Capaian TW I	% Capaian	% Kenaikan Capaian 2024 – 2025	Target 2025	% Capaian terhadap target 2025
-	100	-	100	100	22	22	100,00	-78	100	22

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa target tahunan IK ini adalah 100%, dengan target pada triwulan I adalah 22%, dan capaian pada triwulan I adalah 22%, dengan persentase capaian adalah 100%. Jika dibandingkan dengan capaian pada periode yang sama di tahun 2024 sebesar 100%, maka terjadi penurunan capaian sebanyak 78%. Hal ini disebabkan perbedaan penetapan target antara tahun 2024 dan tahun 2025, dimana pada tahun 2025, penetapan target dibuat bertahap, sehingga capaian akhir adalah 100%, namun pada tahun 2024, penetapan target dari triwulan I sampai dengan IV dibuat sama yaitu 100%. Jika dibandingkan dengan Draf Rencana Kegiatan Pusdik Tahun 2025 – 2029 sebesar 100%, maka persentase capaian adalah 22%. IK ini dimulai di tahun 2022, dengan capaian sebesar 100%, kemudian di tahun 2023 tidak ada IK ini. Dan IK ini kembali ada di tahun 2024 dengan capaian sebesar 100%

Tabel berikut menggambarkan target dan capaian dokumen pada IK ini :

Tabel 3.9 Target dan Capaian Dokumen pada IK : Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lingkup Pusdik KP (%)

No	Target Dokumen Tahunan	Target Dokumen Triwulan I	Capaian Dokumen Triwulan I
Target Tahunan : 100% / 36 dokumen		Target : 22% / 8 dokumen	Capaian : 22% / 8 dokumen
1	Laporan Kepegawaian Triwulanan	Laporan Kepegawaian Triwulan I	Laporan Kepegawaian Triwulan I
2	Laporan Presensi Pegawai Triwulanan	Laporan Presensi Pegawai Triwulan I	Laporan Presensi Pegawai Triwulan I
3	Laporan Humas dan Publikasi Sosial Media Triwulanan	Laporan Humas dan Publikasi Sosial Media Triwulan I	Laporan Humas dan Publikasi Sosial Media Triwulan I
4	Laporan Pengelolaan Persuratan Triwulanan	Laporan Pengelolaan Persuratan Triwulan I	Laporan Pengelolaan Persuratan Triwulan I
5	Laporan Pengelolaan Kearsipan Triwulanan	Laporan Pengelolaan Kearsipan Triwulan I	Laporan Pengelolaan Kearsipan Triwulan I
6	Laporan Layanan Data dan Informasi Triwulanan	Laporan Layanan Data dan Informasi Triwulan I	Laporan Layanan Data dan Informasi Triwulan I
7	Laporan Keuangan Triwulanan	Laporan Keuangan Triwulan I	Laporan Keuangan Triwulan I
8	Laporan SPIP Triwulanan	Laporan SPIP Triwulan I	Laporan SPIP Triwulan I
9	Laporan PIPK		
10	Laporan Tahunan Pusat Pendidikan KP		
11	Laporan Tahunan Layanan Umum dan Perkantoran		
12	Refleksi 2025 dan Outlook 2026		

Penyebab tercapainya IK ini adalah komitmen dari Timja terkait untuk penyelesaian dan pengumpulan data dukung yang menjadi target Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis pada Triwulan ini.

Kegiatan yang mendukung pencapaian IK ini kegiatan Humas dan Publikasi Sosial Media, kegiatan pengendalian intern Pusat Pendidikan KP melalui SPIP, dan pelaksanaan kegiatan dan anggaran di Pusat Pendidikan KP selama Triwulan I 2025

C. Akuntabilitas Keuangan

Pagu anggaran Pusat Pendidikan KP tahun 2025 sebesar Rp40.861.129.000, dengan penyerapan anggaran Triwulan I Tahun 2025 adalah Rp.4.881.277.386, atau sebesar 11,95%. Namun, adanya pemblokiran anggaran sebagai tindak lanjut dari Inpres No. 1 Tahun 2025 sebesar Rp.23.475.213.000, maka pagu efektif di Pusat Pendidikan KP hanya Rp.17.385.916.000, dengan persentase realisasi anggaran adalah 28,08%. Masih

ada sisa pagu sebesar Rp.12.504.638.614, atau 71,92% yang harus direalisasikan selama 9 bulan ke depan.

Tabel 3.10 Tabel Realisasi Anggaran per Jenis Belanja Pusat Pendidikan KP

No	JENIS BELANJA	PAGU SEBELUM BLOKIR	BLOKIR	PAGU DIKURANG BLOKIR	APLIKASI OM SPAN (Berdasarkan Pagu sebelum Blokir)		Aplikasi SAKTI (Berdasarkan Pagu dikurangi Blokir)	
					Realisasi	%	Realisasi	%
1	Belanja Pegawai	8.346.395.000	-	8.346.395.000	2.056.997.713	24,65	2.056.997.713	24,65
2	Belanja Barang	32.514.734.000	23.475.213.000	9.039.521.000	2.824.279.673	8,69	2.824.279.673	31,24
	a.Barang Operasional	2.051.134.000	1.005.174.000	1.045.960.000	243.374.546	11,87	243.374.546	23,27
	b.Barang Non Operasional	30.463.600.000	22.470.039.000	7.993.561.000	2.580.905.127	8,47	2.580.905.127	32,29
TOTAL		40.861.129.000	23.475.213.000	17.385.916.000	4.881.277.386	11,95	4.881.277.386	28,08

Sementara jika dilihat dari anggaran berdasarkan pagu di Perjanjian Kinerja Pusat Pendidikan KP, dimana kinerja Pusat Pendidikan KP merupakan gabungan dari kinerja seluruh satuan pendidikan KP, maka pagu dan realisasi juga merupakan gabungan dari seluruh satuan pendidikan KP. Tabel berikut menggambarkan realisasi per Sasaran Kegiatan bidang pendidikan KP berdasarkan PK

Tabel 3.11 Realisasi Anggaran per Sasaran Kegiatan per 31 Maret 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE (%)
1	Terselenggaranya Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan yang Kompeten	133.846.232.000	16.731.652.125	12,50%
2	Tersedianya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk Pendidikan Tinggi Kelautan dan Perikanan	4.508.000.000	32.278.972	0,72%
3	Terselenggaranya Tata Kelola Pendidikan Kelautan dan Perikanan	22.025.600.000	332.067.165	1,51%
4	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendidikan Kelautan dan Perikanan yang Terstandar	28.417.813.000	103.896.392	0,37%
5	Aparatur KKP yang Dididik dan Dilatih	8.500.000.000	2.293.750.964	26,99%
6	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	275.156.110.000	67.320.260.655	24,47%
TOTAL		472.453.755.000	86.813.906.273	18,38%

Secara umum kinerja Pusat Pendidikan KP Triwulan I Tahun 2025 telah dilaksanakan dan capaian kinerja yang dihasil tercapai secara optimal.

D. Efisiensi Anggaran dan Alokasi Sumber Daya Pusat Pendidikan KP

Organisasi Sektor Publik dituntut untuk memperhatikan *value for money* dalam menjalankan aktivitasnya, termasuk Pusat Pendidikan KP. Tujuan yang dikehendaki masyarakat mencakup pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan *value for money*, yaitu ekonomis dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan, serta efektif dalam arti mencapai tujuan dan sasaran. Sampai dengan triwulan I, masih dalam proses pelaksanaan kegiatan sehingga belum dapat dihitung efisiensi anggaran dan alokasi sumber daya di Pusat Pendidikan KP.

BAB IV

Capaian Indikator Kinerja
Kegiatan

Permasalahan dan
Rekomendasi

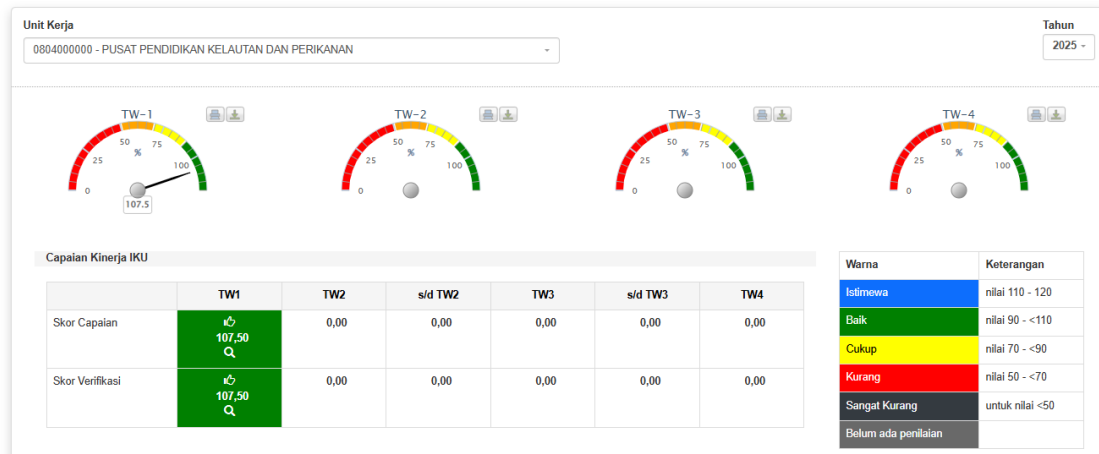
BAB IV

PENUTUP

A. Capaian Kinerja Indikator Kegiatan

Pengukuran capaian kinerja Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan (Pusdik KP) Triwulan I Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*, disingkat KPI). Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak melalui <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian kinerja **Pusdik KP Triwulan I Tahun 2025 sebesar 107.50%**

Gambar 4.1. Hasil capaian Kinerja Pusat Pendidikan KP Triwulan I Tahun 2025 pada tampilan web :



sumber : kinerjaku.kkp.go.id

Periode Triwulan I Tahun 2025, terdapat 3 indikator kinerja yang sudah terealisasi, antara lain :

1. IK Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Pusat Pendidikan KP (%), dengan target tahunan adalah 85%, target triwulan I adalah 85%, dan capaian sebesar 85%, dengan persentase capaian adalah 100%;
2. IK Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Pusat Pendidikan KP (%), dengan target tahunan adalah 80%, target triwulan I adalah 80%, dan capaian sebesar 80%, dengan persentase capaian adalah 120%;

3. IK Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lingkup Pusat Pendidikan KP (%), dengan target tahunan adalah 100%, target triwulan I adalah 22%, dan capaian sebesar 22%, dengan persentase capaian adalah 100%.

B. Permasalahan dan Rekomendasi

Secara umum, kinerja Pusat Pendidikan KP pada triwulan I cukup baik, namun hal yang perlu diperhatikan untuk peningkatan kinerja adalah Indikator Kinerja yang memiliki target tahunan tetap harus dimonitor perkembangan pelaksanaan kegiatan, agar target akhir tahun dapat dicapai dengan baik.



LAMPIRAN

Link Bukti Dukung : <https://bit.ly/PengukuranPusdikTWI2025>



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513287
LAMAM www.kkp.go.id SUREL bppsdm@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PUSAT PENDIDIKAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Alan Frendy Koropitan**
Jabatan : Plt. Kepala Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **I Nyoman Radiarta**
Jabatan : Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 24 Januari 2025

PIHAK KEDUA

Kepala Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kelautan dan Perikanan



I Nyoman Radiarta

PIHAK PERTAMA

Plt. Kepala Pusat Pendidikan
Kelautan dan Perikanan



Alan Frendy Koropitan

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PUSAT PENDIDIKAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1	Terselenggaranya pendidikan vokasi kelautan dan perikanan yang kompeten	1 Peserta pendidikan kelautan dan perikanan yang terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri atau Dunia Kerja (Orang)	2.134
		2 Jumlah lulusan Satuan Pendidikan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Orang)	2.507
		3 Peserta pendidikan vokasi kelautan dan perikanan yang kompeten (Orang)	7.615
		4 Nilai PNBP satker lingkup Pusat Pendidikan KP (Rp. Miliar)	17,48
		5 Kerja sama lingkup Pusat Pendidikan KP yang disepakati (Kesepakatan)	32
		6 Persentase tindak lanjut kerja sama lingkup Pusat Pendidikan KP yang telah disepakati (%)	70
		7 Persentase lulusan satuan pendidikan yang bersertifikasi kompetensi (%)	100
		8 Persentase anak pelaku utama yang diterima sebagai peserta didik baru (%)	100
		9 Persentase peserta didik yang mendukung program prioritas melalui Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) (%)	80
2	Tersedianya ilmu pengetahuan dan teknologi untuk pendidikan tinggi kelautan dan perikanan	10 Kajian Pendidikan Tinggi Kelautan dan Perikanan (Paket)	51
		11 Pengabdian Pendidikan Tinggi Kelautan dan Perikanan (Kelompok)	14
3	Terselenggaranya tata kelola pendidikan kelautan dan perikanan	12 Tenaga Pendidik Kelautan dan Perikanan yang Tersertifikasi (Orang)	500
		13 Norma Standar Prosedur dan Kriteria Pendidikan kelautan dan Perikanan (NSPK)	6
		14 Kelembagaan Publik Pendidikan Kelautan dan Perikanan yang Terakreditasi (Lembaga)	16
		15 Lembaga Pendidikan Kelautan dan Perikanan yang terkelola (Lembaga)	16

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
4	Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan kelautan dan perikanan yang terstandar	16	Peralatan dan Mesin Serta Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Bidang Pendidikan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Paket)	5
		17	Prasarana Pendidikan Menengah dan Tinggi Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Paket)	3
5	Aparatur KKP yang dididik dan dilatih	18	Aparatur KKP yang Diberikan Beasiswa (Orang)	190
		19	Aparatur KKP yang Diberikan Izin Belajar (Orang)	82
		20	Aparatur KKP yang Diberikan Rekomendasi Tugas Belajar Dalam Negeri dan Luar Negeri (Orang)	85
6	Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan	21	Unit Kerja yang dibangun berpredikat WBK/WBBM di lingkup Satuan Pendidikan KP (unit kerja)	4
		22	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Pusat Pendidikan KP (%)	85
		23	Penilaian Mandiri SAKIP Pusat Pendidikan KP (Nilai)	82
		24	Indeks Profesionalitas ASN Pusat Pendidikan KP (Indeks)	87
		25	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Pusat Pendidikan KP (%)	80
		26	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pusat Pendidikan KP (%)	80
		27	Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan pada unit kerja lingkup Pusat Pendidikan KP (Proposal)	1
		28	Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lingkup Pusat Pendidikan KP (%)	100

Data Anggaran

No	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Pendidikan Kelautan dan Perikanan	188.797.645.000
2	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	275.156.110.000
3	Pendidikan dan Pelatihan Aparatur KP	8.500.000.000
Total Anggaran Pendidikan KP Tahun 2025		472.453.755.000

Jakarta, 24 Januari 2025

PIHAK KEDUA

Kepala Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kelautan dan Perikanan



I Nyoman Radiarta

PIHAK PERTAMA

Plt. Kepala Pusat Pendidikan
Kelautan dan Perikanan



Alan Frendy Koropitan



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513287
LAMAN www.kkp.go.id SUREL bppsdm@kkp.go.id

SURAT TUGAS

NOMOR : B.55/BPPSDM.3/KP.440/II/2025

- Menimbang : 1 bahwa untuk terselenggaranya *good governance* dan *clean governance* dalam rangka tata pemerintahan yang baik sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara maka perlu adanya Laporan Kinerja (LKj);
- 2 bahwa berdasar pertimbangan poin 1, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan tentang Tim Penyusun Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2024 dan Laporan Kinerja Triwulan Tahun 2025 pada Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan;
- Mengingat : 1 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 2 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 4 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- 5 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker Sekretariat BRSDM KP Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA – 032.12.626402/2025, tanggal 4 Desember 2024

Terima Kasih untuk tidak memberikan sesuatu atau janji yang dapat mengakibatkan KKN, gratifikasi dan benturan kepentingan.

Jakarta, 3 Januari 2025
Plt. Kepala Rusal Pendidikan
Kelautan dan Perikanan,



Lampiran 1 Surat Tugas

Nomor : B. 55 /BPPSDMKP.3/ KP.44/01/2025

**SUSUNAN
TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA (LKj) TAHUN 2024
DAN LAPORAN KINERJA TRIWULAN TAHUN 2025
PADA PUSAT PENDIDIKAN KP**

Jabatan dalam Tim / Nama	Uraian Tugas
Penanggung Jawab : Kepala Pusat Pendidikan KP	Bertanggung jawab atas Laporan Kinerja
Ketua : Ketua Tim Kerja Dukungan Manajerial, Pusat Pendidikan KP	Mengkaji, menelaah dan menganalisa Laporan Kinerja
Sekretaris : Desianti Yuanita, S.I.Kom	a. Menyusun rencana kegiatan, mulai dari perencanaan, program dan evaluasi kegiatan; b. Mengkoordinir Penyusunan Laporan; c. Melakukan verifikasi atas Laporan Kinerja yang akan disusun; d. Memastikan Laporan terkirim ke Kepala BPPSDM KP tembusan Sekretariat BPPSDM KP paling lambat tanggal 21 Januari 2025 untuk LKj Tahun 2024, dan sebelum tanggal 20 bulan berikutnya untuk LKj Triwulan 2025.
Anggota : 1. Hazira Nurfebriyani, A.Md.M 2. Suherman S.E, M.Si 3. Halfa Fadhila, S.S	a. Menghimpun dan mengolah data capaian kinerja dari masing-masing PIC di Pusat Pendidikan KP dan Satuan Pendidikan KP; b. Menyiapkan bahan penyusunan laporan; c. Menyiapkan data dukung; d. Melakukan kompilasi dan menyusun menjadi satu Laporan Kinerja Institusi; e. Membuat draft cover Laporan Kinerja; f. Menggandakan dan mendokumentasikan Laporan Kinerja; g. Mengirim Laporan Kinerja ke Kepala BPPSDM KP tembusan Sekretariat BPPSDM KP.

Terima Kasih untuk tidak memberikan sesuatu atau janji yang dapat mengakibatkan KKN, gratifikasi dan benturan kepentingan.

Jakarta, 3 Januari 2025
Plt. Kepala Pusat Pendidikan
Kelautan dan Perikanan,



Alvin Fendy Koropitan